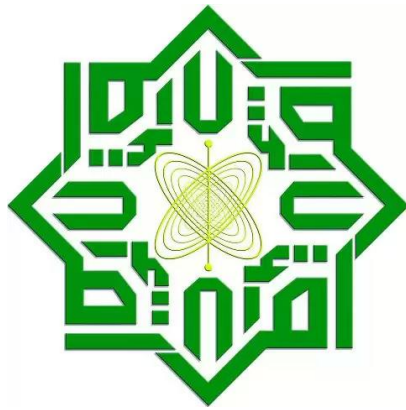


# LAPORAN PENELITIAN

**PEMAHAMAN PEMUKA AGAMA TERHADAP PBM MENTERI AGAMA  
DAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR : 9/8 TAHUN 2006 TENTANG  
KERUKUNAN ANTAR UMAT BERAGAMA DAN PENGARUHNYA PADA  
PELAKSANAAN PEMBINAAN KERUKUNAN ANTAR  
UMAT BERAGAMA DI PEKANBARU – RIAU**



**O L E H:**

**Peneliti Utama : ELFIANDRI, M.Si**

**NIP : 197003121997031006**

**Anggota : FEBRI RAHMI, SE.M.Sc.Ak**

**NIP : 197202092006042002**

**Anggota : PERDAMAIAN. M.A**

**NIP : 196211241996031001**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
TAHUN 2012**

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan Hidayah, hingga akhirnya dapat diselesaikan laporan penelitian ini. Shalawat dan salam kepada junjungan alam nabi besar Muhammad SAW, yang telah membawa umatnya untuk selalu menuntut ilmu pengetahuan.

Dalam penelitian ini banyak pihak yang telah membantu, dan karena itu diberikan penghargaan dan ucapan terimakasih kepada:

1. Rektor UIN SUSKA Riau yang telah memberi peluang untuk mengadakan penelitian .
2. Direktur Pusat Penelitian dan Pengembangan Departemen Agama Jakarta yang telah memberikan kesempatan untuk melaksanakan penelitian ini
3. Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA Riau yang telah memberi motivasi dan peluang kepada Tim peneliti untuk melaksanakan penelitian.
4. Para nara sumber dalam seminar hasil penelitian yang banyak memberikan masukan dan inspirasi yang cukup berarti.
5. Para pemuka agama Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu dan Budha yang telah membantu dalam pelaksanaan penelitian ini.
6. Responden dan Informan dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu dan yang telah memberikan berbagai macam data, sehingga tulisan ini dapat diselesaikan dengan baik.

Peneliti menyadari bahwa mungkin masih terdapat kesalahan dan kekurangan dalam penelitian ini. Dengan segala kerendahan hati mohon saran dan dengan ketulusan hati dihaturkan ribuan terimakasih atas segala saran, masukan dan kritikan kepada para pembaca guna perbaikan dimasa datang.

Pekanbaru, September 2012  
Wassalam,

Tim Peneliti

## DAFTAR ISI

	<b>Hal.</b>
Kata Pengantar ..	i
Daftar Isi ..	ii
Daftar Tabel ..	iii
Daftar Lampiran ..	iv
<b>Bab I Pendahuluan ..</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	3
C. Tujuan Penelitian .....	3
D. Manfaat Penelitian .....	4
E. Urgensi Penelitian .....	4
F. Kerangka Berpikir .....	5
<b>Bab II Tinjauan Pustaka.....</b>	<b>8</b>
A. Pemahaman .....	8
A.1. Pengertian Pemahaman.....	8
A.2. Tingkat Pemahaman .....	8
A.2.1. Kognisi .....	9
A.2.2. Afeksi .....	9
A.2.3. Psikomotorik/ Konasi. ....	10
A.3. Faktor Yang Mempengaruhi Pemahaman .....	10
B. Kerukunan Umat Beragama .....	10
B.1. Kerukunan Antar Umat Beragama .....	10
B.2. Faktor Penyebab Konflik Antar Umat Beragama. ....	12
B.3. Kehidupan Beragama Di Indonesia .....	12
<b>Bab III Metode Penelitian .....</b>	<b>17</b>
A. Populasi dan Sampel .....	17
B. Data dan Sumber Data.....	17
C. Definisi Variabel Operasional dan Pengukuran .....	17
D. Metode Analisis Data .....	20

<b>Bab IV Hasil dan Pembahasan</b> .....	23
A. Analisis Deskriptif .....	23
B. Uji Reliabilitas dan Validitas .....	34
C. Uji Normalitas Residual.....	44
D. Uji Hipotesis .....	46
D.1. Hipotesis Pertama.....	46
D.2. Hipotesis Kedua .....	47
D.2.1. Koefisien Determinasi.....	47
D.2.2. Uji Signifikansi Simultan (F-Test).....	48
D.2.3. Uji Parameter Individual (t-test) .....	49
E. Pembahasan.....	50
E.1. Pembahasan Hipotesis Pertama .....	50
E.2. Pembahasan Hipotesis Kedua.....	52
<b>Bab V Penutup</b> .....	54
A. Kesimpulan .. ..	54
B. Saran. ....	55
C. Keterbatasan Penelitian .....	56
Daftar Pustaka .....	viii
Lampiran .....	ix

## DAFTAR TABEL

	<b>Hal.</b>
Tabel 1.Sampel Yang Digunakan Dalam Penelitian .....	23
Tabel 2 Tahu Fungsi SPBM Tentang Kerukunan Beragama .....	24
Tabel 3 Tahu Tujuan SPBM Tentang Kerukunan Beragama.....	24
Tabel 4 Tahu Peranan Kepala Daerah Dalam Membina Kerukunan Beragama .....	24
Tabel 5 Tahu Peranan FKUB Dalam Membina Kerukunan Beragama .....	25
Tabel 6 Tahu Penyelesaian Konflik Antar Umat Beragama .....	25
Tabel 7 Tahu Prosedur Pendirian Rumah Ibadah .....	26
Tabel 8 Pemuka Agama Bertanggungjawab Membina Kerukunan Umat Beragama .....	26
Tabel 9 Pemuka Agama Bertanggungjawab Mensosialisasikan PBM.....	26
Tabel 10 Dialog Teman Seagama Dalam Membina Kerukunan Umat Beragama.....	27
Tabel 11 Dialog Teman Tidak Seagama Dalam Membina Kerukunan Umat Beragama .....	27
Tabel 12 Sosialisasi Teman Seagama Dalam Membina Kerukunan Umat Beragama	28
Tabel 13 Sosialisasi Teman Tidak Seagama Dalam Membina Kerukunan Umat Beragama .....	28
Tabel 14 Saling Koordinasi Teman Seagama Dan Tidak Seagama Dalam Membina Kerukunan Umat Beragama .....	28
Tabel 15 Pendidikan Terakhir Pemuka Agama .....	29
Tabel 16 Lama Pemuka Agama Membina Umat .....	29
Tabel 17 Motivasi Membina Umat.....	29
Tabel 18 Pengaruh Peraturan Dan Undang-Undang Negara Dalam Membina Umat	30
Tabel 19 Pengaruh Peraturan Daerah (PERDA) Dalam Membina Umat .....	30
Tabel 20 Pengaruh Peraturan Gubernur/ Walikota/Bupati Dalam Membina Umat ...	30
Tabel 21 Pengaruh Sikap Birokrat/ Aparatur Pemerintah Pusat .....	31
Tabel 22 Pengaruh Sikap Aparatur Pemerintah Daerah .....	31
Tabel 23 Pengaruh Sikap FKUB .....	31
Tabel 24 Dialog Antar Umat Beragama Dalam 5 Tahun Terakhir .....	32
Tabel 25 Terlibat Penyelesaian Konflik Agama Dalam 5 Tahun Terakhir.....	32

Tabel 26 Mengikuti/ Diundang Dialog Antar Pemuka Agama .....	32
Tabel 27 Pelaksanaan SKPBM No.9/8 Tahun 2006 Tentang Kerukunan Beragama.....	33
Tabel 28 Pelaksanaan SKPBM No.9/8 Tahun 2006 Dalam Pendirian Rumah Ibadah.....	33
Tabel 29 Kerja Sama Dengan Ormas Agama Lain Dalam 5 Tahun Terakhir.....	33
Tabel 30 Kontribusi FKUB Dalam Membina Kerukunan Beragama .....	34
Tabel 31 Uji Reliabilitas Pemahaman Pemuka Agama (Kognisi,Afeksi,Konasi) .....	34
Tabel 32 Uji Reliabilitas Implementasi PBM .....	35
Tabel 33 Uji Reliabilitas Regulasi.....	36
Tabel 34 Uji Reliabilitas Sikap Aparatur Pemerintah .....	37
Tabel 35 Uji Validitas Pemahaman Pemuka Agama Secara Kognisi .....	38
Tabel 36 Uji Validitas Pemahaman Pemuka Agama Secara Afeksi .....	39
Tabel 37 Uji Validitas Pemahaman Pemuka Agama Secara Konasi.....	40
Tabel 38 Uji Validitas Implementasi PBM Dalam Membina Kerukunan Umat Beragama.....	41
Tabel 39 Uji validitas Sumber Daya Manusia Pemuka Agama .....	42
Tabel 40 Uji Validitas Regulasi.....	43
Tabel 41 Uji Validitas Sikap Birokrat/Aparatur Pemerintah.....	43
Tabel 42 Normalitas Residual .....	45
Tabel 43 Analisis Korelasi Pemahaman Pemuka Agama .....	46
Tabel 44 Hasil Uji Koefisien Determinasi .....	47
Tabel 45 Hasil Uji F .....	48
Tabel 46 Hasil Uji T .....	49

## DAFTAR LAMPIRAN

	<b>Hal.</b>
Lampiran 1. Sampel yang digunakan dalam penelitian.....	1
Lampiran 2 Hasil uji Hipotesis Pertama.....	6
Lampiran 3 Hasil uji Hipotesis Kedua .....	7

**Pemahaman Pemuka Agama Terhadap PBM Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 9/8 Tahun 2006 Tentang Kerukunan Antar Umat Beragama Dan Pengaruhnya Pada Pelaksanaan Pembinaan Kerukunan Antar Umat Beragama Di Pekanbaru – Riau**

(Elfiandri, M.Si., Perdamaian, M.Ag., Febri Rahmi, M.Sc.Ak)

**ABSTRAK**

Penelitian ini yang bertujuan pertama untuk mengetahui pemahaman pemuka Agama terhadap PBM Nomor : 9/8 Tahun 2006 tentang kerukunan Antar Umat beragama. Kedua untuk mengetahui pengaruh Faktor SDM Pemuka Agama, Regulasi dan Sikap Birokrat/ Aparatur pemerintah terhadap pelaksanaan PBM Nomor : 9/8 tahun 2006 tentang Pembinaan Kerukunan antar umat Beragama.

Pemuka agama dari 5 agama terbesar yaitu Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu dan Budha yang ada di Pekanbaru Propinsi Riau merupakan sampel dalam penelitian, dengan menggunakan data primer dan teknik *purposive sampling*. Metode analisis data untuk menjawab permasalahan pertama adalah korelasi dan untuk menjawab permasalahan kedua adalah dengan regresi linier berganda.

Berbagai peristiwa konflik agama yang terjadi selama ini bukan saja dipicu oleh persepsi umat, tetapi terkadang juga disebabkan sikap dan perilaku pemuka agama yang tidak terbuka terhadap agama lain. Kesalahan pemahaman, regulasi dan sikap dari birokrat/ aparatur pemerintah terhadap peraturan bersama menteri agama dan menteri dalam negeri nomor 9/8 tahun 2006 dalam pembinaan kerukunan umat beragama dapat mendorong munculnya potensi konflik sosial antar dan inter umat beragama.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh jawaban mendukung hipotesis pertama yaitu pemahaman pemuka agama (kognisi, afeksi dan konasi) berkorelasi signifikan terhadap pelaksanaan Peraturan Bersama Menteri (PBM) dalam pembinaan kerukunan umat beragama. Sementara itu, hipotesis kedua dinyatakan Sumber Daya Manusia pemuka agama, regulasi dan sikap aparatur pemerintah secara bersama-sama (*F-test*) berpengaruh terhadap implementasi PBM dalam pembinaan kerukunan umat beragama. Akan tetapi dari hasil uji t diperoleh hasil bahwa implementasi PBM dipengaruhi oleh regulasi dan sikap aparatur pemerintah.

**Kata Kunci:** Pemahaman pemuka agama (kognisi, afeksi, konasi), Sumber Daya Manusia Pemuka Agama, Regulasi, Sikap Birokrat/ Aparatur Pemerintah, Implementasi Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri no. 9/8 tahun 2006



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar belakang**

Indonesia merupakan negara yang dihuni lebih kurang 360 etnis, dan ada lima agama yang diakui oleh Negara yaitu agama Islam, Kristen Protestan, Kristen Katholik, Budha, Hindu, Kongfu Chu. Sebagai Negara heterogen, interaksi sosial masyarakat sangat berpeluang terjadinya konflik, baik berlatar belakang ekonomi, suku dan budaya maupun Agama.

Khusus bidang keagamaan, untuk membina hubungan antar umat beragama di Indonesia, pemerintah berusaha melakukan pembinaan terhadap umat beragama. Salah satunya melalui Peraturan bersama (PBM) menteri Agama dan Dalam Negeri Nomor: 9/8 Tahun 2006, mengenai pembinaan kerukunan umat beragama di Indonesia. Dalam PBM Nomor : 9/8 Tahun 2006. Dalam Bab I Ketentuan Umum pasal 1 dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan kerukunan umat beragama adalah keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara didalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945.

Sementara itu pelaksana tugas pemeliharaan kerukunan umat beragama dijelaskan dalam Bab 2 pasal 3 dan 4 ayat 1, dibebankan kepada Gubernur untuk pemerintahan Provinsi, dan Walikota/ Bupati untuk pemerintahan Kota dan Kabupaten. Dalam ayat 2 ditambahkan dengan pembantu pelaksanaan tugas oleh Kepala Kantor Departemen Agama Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Lebih lanjut, PBM Agama dan Dalam Negeri nomor 9/8 tahun 2006 juga mengatur perlunya keterlibatan masyarakat pemuka-pemuka agama dalam pemeliharaan serta pembinaan kerukunan antar umat beragama, melalui Forum kerukunan Umat beragama (FKUB). Keterlibatan pemeluk agama dengan system perwakilan diharapkan pembinaan kerukunan umat antar beragama dapat dilaksanakan sebagaimana diharapkan dalam PBM nomor : 9/8 tahun 2006 tersebut.

Pelaksanaan kerukunan umat beragama di Indonesia pernah mendapatkan pujian dari Perserikatan Bangsa-Bangsa yang disampaikan oleh utusan Sekjen PBB Jamsheed Marker yang datang ke Indonesia Maret 1997. Namun berbagai kasus hubungan antar dan inter umat beragama masih menodai interaksi sosial umat beragama di Indonesia. Noda interaksi sosial antar dan inter umat beragama masih menimbulkan berbagai konflik sosial, baik yang dipicu oleh ajaran keagamaannya, maupun berkaitan dengan pendirian rumah ibadah, serta persepsi antar umat beragama dan lain sebagainya. Misalnya konflik umat inter agama kasus pendirian Bangunan di Bogor, <http://www.suarapembaruan.com/home/kasus-gki-yasmin-bukan-konflik-antarumat-beragama/10135>, *down load, 12 maret 2011 pukul 10.53 WIB*.

Dipihak lain, Konflik Poso, ada fakta sejarah yang sangat menarik bahwa gerakan kerusuhan yg dimotori oleh umat Kristen dimulai pada awal Nopember 1998 di Ketapang Jakarta Pusat dan pertengahan Nopember 1998 di Kupang Nusa Tenggara Timur. Kemudian disusul dengan peristiwa penyerangan umat Kristen terhadap umat Islam di Wailete Ambon pada tanggal 13 Desember 1998. *Sumber <http://denaizzkakakecil.wordpress.com/2009/11/10/konflik-agama/> Down Load, 12 Maret 2012 pukul 10.12 WIB*.

Dewasa ini, meskipun PBM nomor 9/8 Tahun 2006, tentang kerukunan hidup antar umat beragama telah tersosialisasi selama hampir lima tahun, akan tetapi berbagai hubungan antar umat beragama masih dinodai oleh berbagai konflik antar dan inter umat beragama. Konflik antar atau inter umat beragama tidak saja merusak interaksi sosial antar dan inter beragama saja, tapi juga menyeret dan sebagai pemicu muncul kerawanan interaksi sosial antara anak bangsa, bahkan konflik agama tidak hanya merusak interaksi sosial ansih tetapi juga akan mengganggu perekonomian masyarakat secara khusus dan Negara secara umum. Dengan adanya konflik agama, akan menimbulkan prasangka sosial antara anak bangsa, bemula dari rasa kecurigaan tersebut mendorong sikap bahkan perilaku tidak bersedia bekerjasama, serta hidup saling menolong, dan bertegur sapa.

Menelaah berbagai pemicu konflik agama, bukan selamanya didalangi oleh persepsi umat. Terkadang lebih disebabkan sikap dan perilaku pemuka agama yang

tidak terbuka terhadap agama lain, dalam pengertian pemahaman keagamaan yang salah, atau bisa saja adanya lebih disebabkan oleh faktor pemahaman pemuka agama terhadap PBM nomor 9/8 Tahun 2006, tentang kerukunan umat beragama, atau penyebab regulasi atau kepribadian birokrat yang mendorong lahirnya sikap dan perilaku yang berpotensi memicu konflik sosial antar dan inter umat beragama.

Berawal dari berbagai kasus dan pertanyaan diatas, maka ditetapkanlah judul penelitian ini **Pemahaman Pemuka Agama Terhadap PBM Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 9/8 Tahun 2006** Tentang Kerukunan Antar Umat Beragama Dan Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Pembinaan Kerunan Antar Umat Beragama Di Pekanbaru – Riau.

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Pemahaman pemuka Agama terhadap PBM Nomor : 9/8 Tahun 2006 tentang Pembinaan kerukunan Antar Umat beragama di Pekanbaru Provinsi Riau?
2. Apakah ada Pengaruh Faktor Sumber Daya Manusia (SDM) Pemuka Agama, Regulasi dan Sikap Birokrat/aparatur pemerintah terhadap pelaksanaan PBM Nomor : 9/8 tahun 2006 tentang Pembinaan Kerukunan antar umat Bergama di Pekanbaru provinsi Riau?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dilaksanakan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pemahaman pemuka Agama terhadap PBM Nomor : 9/8 Tahun 2006 tentang kerukunan Antar Umat beragama di Pekanbaru Provinsi Riau
2. Untuk mengetahui pengaruh Faktor Sumber Daya Manusia (SDM) Pemuka Agama, Regulasi dan Sikap Birokrat/aparatur pemerintah terhadap pelaksanaan PBM Nomor : 9/8 tahun 2006 tentang Pembinaan Kerukunan antar umat Beragama di kota Pekanbaru Provinsi Riau.

## **D. Manfaat penelitian.**

Hasil dari Penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk sebagai berikut :

1. Bahan Masukan Kepada Pemerintah Dalam Melakukan Evaluasi Pelaksanaan PBM Nomor : 9/8 Tahun 2006 Tentang Pembinaan Kerukunan Antar Umat Beragama Di Indonesia
2. Sebagai Bahan Bagi Pemerintahan Provinsi Dan Kabupaten/ Kota Dalam Pembinaan Kerukunan Umat Beragama Di Wilayah Masing-Masing
3. Sebagai Bahan Masukan Bagi Pemuka Agama Dalam Melaksanakan Pembinaan Kerukunan Antar Umat Beragama

#### **E. Urgensi penelitian**

Peraturan bersama Menteri Agama dan Dalam Negeri nomor : 9/8 Tahun 2006, tentang kerukunan umat beragama sudah berjalan selama lima tahun, namun berbagai konflik agama baik inter maupun antar umat beragama masih menodai interaksi sosial agama dalam masyarakat. Berbagai konflik sosial baik yang disebabkan faktor kesenjangan sosial, ekonomi, politik maupun faktor budaya dan bahkan faktor agama, telah merugikan masyarakat secara material dan juga secara spiritual bahkan jiwa manusia. Dalam skop yang lebih umum, berbagai konflik sosial dan agama juga telah memicu kerugian terhadap nilai-nilai kesatuan bangsa yaitu terganggunya interaksi sosial, dimana kekuatan sosial merupakan salah satu modal dalam membangun bangsa ini.

Menurut Jusuf Kalla, konflik suku dapat didamaikan secara adat, sedangkan konflik karena kepentingan politik bisa diatasi dengan memberi konsesi. *Kedua* konflik ini bisa selesai dengan cepat dan tidak menimbulkan bekas yang mendalam. Berbeda dengan konflik agama yang sangat sulit diatasi tanpa kesadaran yang timbul dari hati nurani kita para pemeluk agama. Konflik antar agama dapat meninggalkan bekas yang mendalam, dan tidak seorang pun dapat bersikap netral dalam mengatasi konflik tersebut.

Menelaah berbagai konflik antar umat beragama, tidak selamanya dipicu oleh umat itu sendiri. Adapula konflik agama itu bermuara dari pemuka agama itu sendiri, bahkan ada juga diawali dari regulasi atau kebijakan pemerintah.

Mengacu kepada hal diatas, maka penelitian ini dinilai sangat urgen untuk mengetahui bagaimana pengaruh pemahaman pemuka agama terhadap PBM menteri agama dan dalam negeri nomor : 9/8 tahun 2006, tentang kerukunan umat beragama pada pelaksanaan pembinaan kerukunan umat beragama. Disamping itu penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui bagaimana faktor dari Sumber daya manusia pemuka agama, faktor Regulasi serta Sikap Birokrat atau aparatur pemerintah terhadap implementasi PMB dalam pembinaan kerukunan umat beragama. Mengingat kerukunan umat beragama merupakan salah satu modal sosial dalam membangun interaksi sosial serta karakter bangsa, persoalan yang berkaitan dengan upaya pembinaan kerukunan umat beragama merupakan hal yang sangat urgen untuk diperhatikan baik dalam bentuk interaksi sosial umat beragama maupun regulasi yang berkaitan dengan pembinaan kerukunan umat beragama tersebut.

#### **F. Kerangka Pikir.**

Pemahaman atau pengetahuan terhadap konsep dan tujuan dari suatu program merupakan modal dasar untuk mencapai tujuan dari suatu program, sebab pemahaman atau pengetahuan yang rendah terhadap suatu tujuan akan mempengaruhi hasil yang hendak dicapai. Dalam konteks keagamaan, untuk mencapai tujuan yang baik mengenai kerukunan umat beragama, maka pemahaman atau pengetahuan para pemuka agama harus selalu diperhatikan, untuk melihat suatu pemahaman.

Menurut Wahyudin dkk (2006:30), perilaku dalam pemahaman itu dibagi kedalam tiga klasifikasi perilaku yaitu perilaku kognisi yang berkaitan dengan pengetahuan, kedua perilaku afeksi yang berkaitan dengan perasaan atau emosional, dan ketiga perilaku psikomotorik/ konatif yaitu berhubungan ranah gerakan fisik. Disisi lain, terjadinya konflik agama sering dikatakan dipicu oleh pemahaman umat yang salah terhadap ajaran agama, sehingga kesalahan umat dalam pemahaman keagamaan mendorong sikap dan tindakan anarkis para penguat suatu agama,

Menurut Adat Supratno, berdasarkan fenomena yang ada, sebenarnya timbullah konflik antar umat beragama tersebut didorong oleh beberapa faktor, yaitu:

- 1) Faktor tradisi, yang ada sejak nenek moyang mereka.
- 2) Faktor kekerabatan antar suku bangsa, yang saling menonjolkan yang menimbulkan sengketa.
- 3) Faktor misi dakwah, yang harusnya menekankan aspek kemanusiaan dan pemberdayaan umat, malah menyimpang ke hal-hal yang radikal.
- 4) Faktor kerjasama antar tokoh agama, pemimpin adat dan aparat pemerintah yang jarang sekali berdialog.
- 5) Ada persepsi antar umat agama, bahwa perbedaan agama merupakan masalah yang tidak lazim dan harus diperdebatkan.
- 6) Adanya provokasi yang menimbulkan perpecahan, baik oleh masyarakat, tokoh dan pemimpin maupun pihak ketiga.

Dari berbagai faktor yang mendorong terjadinya konflik antar umat beragama menjelaskan bahwa tidak efektifnya PBM Menteri Agama dan menteri Dalam Negeri nomor 9/8 Tahun 2006, tentang kerukunan umat beragama lebih menekankan kepada faktor umat.

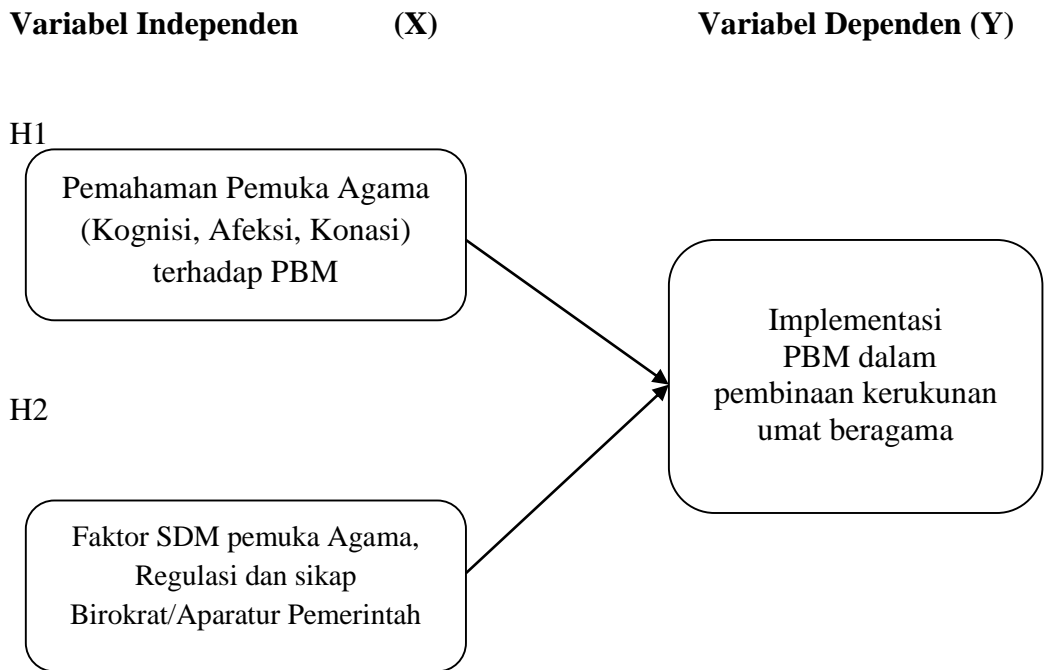
Dari beberapa penelitian sebelumnya belum menjelaskan bagaimana faktor pemahaman pemeluk agama terhadap PBM mempengaruhi implementasi pelaksanaan PBM dalam pembinaan kerukunan umat beragama, serta bagaimana pula faktor sumber daya manusia pemuka agama dan faktor regulasi yang dikeluarkan pemerintah serta faktor personality birokrasi atau aparatur Pemerintah memberi pengaruh terhadap implementasi pelaksanaan PBM dalam pembinaan kerukunan umat beragama.

Berdasarkan beberapa hal diatas, maka dapatlah disusun kerangka berpikir dalam bentuk desain penelitian ini yang dibagi kepada dua Variabel independen dan satu variabel dependen. Adapun variabel independen adalah *pertama* Pemahaman pemuka agama terhadap PBM, kedua Variabel independen berupa Faktor SDM pemuka Agama, Regulasi dan Sikap Birokrat/Aparatur Pemerintah

Sedangkan Variabel dependen adalah Implementasi PBM dalam pembinaan kerukunan umat beragama di Pekanbaru provinsi Riau. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam desain kerangka berpikir penelitian pada gambar 1.1 berikut :

**Gambar .1.1**

Desain Kerangka berpikir



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Pemahaman**

##### **A.1. Pengertian Pemahaman**

Pemahaman merupakan fase awal untuk mencapai tujuan. Pemahaman yang benar terhadap konsep serta tujuan, akan mempengaruhi tingkat keberhasilan suatu program dan begitu juga sebaliknya. Pemahaman yang salah terhadap konsep, mencapai tujuan, akan mempengaruhi capaian yang diharapkan.

Oleh sebab itu, pemahaman terhadap konsep serta tujuan suatu program merupakan pondasi dasar dalam mencapai suatu program. Begitu juga halnya dengan pemahaman para pemuka agama terhadap tujuan dari PBM menteri Agama dan Menteri Dalam negeri Nomor : 9/8 Tahun 2006, tentang kerukunan hidup antar umat beragama, akan mempengaruhi pelaksanaan pembinaan kerukunan antar umat beragama.

Pemahaman ini berasal dari kata "Faham" yang memiliki arti tanggap, mengerti benar, pandangan, ajaran. Secara spesifik pemahaman juga dapat diartikan sebagai kemampuan memahami sesuatu. Disisi lain pemahaman juga dapat dimaksudkan sebagai kemampuan memahami atau mengerti tentang isi pelajaran yang dipelajari tanpa perlu mempertimbangkan atau memperhubungkannya dengan isi pelajaran lainnya. <http://id.shvoong.com/social-sciences/education/2200774-pengertian-pemahaman/> downl oad tanggal 12 Maret 2011 pukul. 15.52 WiB.

##### **A.2. Tingkatan pemahaman**

Secara umum tingkatan pemahaman itu terbagi kepada tiga tingkatan, *pertama* pemahaman tingkat rendah yaitu pemahaman tingkat dasar seperti pemahaman dalam membaca teks yang ada, *Kedua* pemahaman menengah yaitu pemahaman tidak hanya secara tekstual saja, tetapi pemahaman yang disertai upaya penafsiran terhadap suatu teks. *Ketiga* adalah pemahaman tingkat tinggi yaitu, kemampuan dalam melakukan ekstrapolasi yaitu kemampuan dalam melihat



dibalik apa yang tampak, bahkan mampu melakukan prediksi serta memperluas persepsi terhadap waktu dan suatu masalah.

Menurut Blook dkk (magnum, T 2010:1, dalam <http://tatangmanguny.wordpress.com>) membagi tiga bagian utama perilaku yaitu *perilaku kognisi*, *perilaku afeksi* dan *perilaku psikomotorik*. Lebih lanjut dijelaskan bahwa ranah kognisi adalah kemampuan berkaitan dengan pengetahuan dari tingkat rendah sampai tingkat tinggi yang terdiri dari ingatan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesa dan evaluasi.

#### **A.2.1. Perilaku Kognisi**

Menurut Wahyudin dkk (2006:30) perilaku kognisi merupakan perilaku siswa dalam upaya mengenali dan memahami materi pelajaran. Lebih lanjut dikatakan bahwa perilaku kognisi dibagi kepada 6 tahapan yaitu tahapan *pertama* pengetahuan/ *knowledge* yaitu kemampuan jenjang paling rendah dalam ranah kognisi. Tahapan *kedua*, pemahaman/*comprehension* yakni kemampuan berpikir. Tahapan *ketiga* adalah penerapan/*application* yakni kemampuan menggunakan teori-teori dan prinsip-prinsip, rumusan dan abstraksi dalam situasi tertentu. Tahapan *keempat* adalah analisis yakni kemampuan untuk menguraikan suatu keseluruhan atau suatu system hubungan kedalam unsur-unsur yang membentuknya. Tahapan *kelima* Sintesis/*synthesis* yaitu kemampuan untuk memadukan atau menyatukan bagian-bagian atau bagian-bagian secara logis menjadi suatu peta struktur yang menunjukkan keseluruhan. Tahapan *keenam* adalah evaluasi/*evaluation* yakni kemampuan dalam mempertimbangan suatu ide, situasi, nilai-nilai, metode berdasarkan suatu aturan/kriteria tertentu. <http://id.shvoong.com/social-sciences/education/2200774-pengertian-pemahaman/>, Down Load, 12 Maret 2012, pukul 14.25 WIB.

#### **A.2.2. Ranah Afeksi**

Ranah afeksi adalah kemampuan yang berkaitan dengan perasaan, sikap, emosi, derajat, penerimaan atau penolakan terhadap objek.

### **A.2.3. Ranah Psikomotorik**

Ranah psikomotorik adalah kemampuan melakukan pekerjaan dengan anggota badan (berkaitan dengan gerak fisik). Ranah psikomotorik adalah gerak fisik, koordinasi dan kemampuan menggunakan gerak motorik. <http://id.shvoong.com/social-sciences/education/2200774-pengertian-pemahaman/>, Down Load, 12 Maret 2012, pukul 14.25 WIB.

### **A.3. Faktor yang mempengaruhi Pemahaman**

Suatu pemahaman bukanlah berdiri sendiri, artinya pemahaman dapat dipengaruhi oleh faktor eksternal seseorang, berikut ini beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pemahaman seseorang terhadap sesuatu sebagai berikut :

- a) Faktor Informasi. Informasi adalah suatu data yang diterima oleh seseorang terhadap sesuatu hal, melalui informasi manusia akan memperbaharui data atau pengetahuannya yang sudah ada dalam dirinya.
- b) Faktor Media massa. Media merupakan sarana atau fasilitas untuk menyampaikan pesan, baik media cetak maupun elektronik, melalui media masa seseorang mendapatkan informasi baik yang sudah diketahuinya ataupun bersifat informasi baru. Media massa mampu menghantarkan pesan kepada seseorang, sehingga akan mempengaruhi pemahaman seseorang terhadap apa yang telah diketahui maupun yang belum diketahui.
- c) Dialog, dialog merupakan salah satu cara manusia untuk memperbaharui pemahamannya, dengan adanya dialog seseorang akan dapat bertukar informasi serta memperbaharui pemahamannya, dalam dialog tidak hanya bersifat bertukar pemahaman, akan tetapi melalui dialog dapat ditemukan pemahaman baru yang belum dipahami sebelumnya.

## **B. Kerukuan Umat Beragama**

### **B.1. Kerukunan Antar Umat Beragama**

Menurut H. A. Hamdan, kerukunan beragama berarti hubungan sesama umat beragama dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya dan kerjasama dalam kehidupan

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara didalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD RI tahun 1945. (<http://www.win2pdf.com>. Down load, 10 Maret 2012, pukul 10.00 Wib.). Sementara itu menurut Peraturan Bersama Menteri (PBM) Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 9/8 tahun 2006, tentang kerukunan antar umat beragama pada Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat 1, dikatakan bahwa yang dimaksud dengan ayat Kerukunan umat beragama adalah keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945.

UU Hamidy (2003) menjelaskan, memperhatikan segala sesuatu yang berhubungan dengan segi-segi yang harus wujud dalam bentuk yang tertib, yang dahulu didahulukan yang kemudian dikemudiankan merupakan arti sebuah kerukunan, sebagaimana yang dapat kita lihat rujukannya dalam rukun sholat. Semua aspek dalam rukun harus tertib (sistematik) juga tidak boleh ada satu segipun yang diabaikan, seperti peraturan atau kaedah memperkuat satu dengan yang lain. Rukun akan menghasilkan sesuatu yang kokoh, baik dan menguntungkan kepada siapapun, dan sebaliknya jika nilai-nilai, norma dan hukum tidak dipenuhi serta tidak berlaku secara tertib, maka kerukunan tidak dapat terwujud, dan akhirnya akan terjadi perpecahan, perselisihan dan bisa merugikan kepada semua pihak.

Secara fitrah manusia cenderung pada kerukunan, sebab dengan kerukunan orang dapat berbuat tanpa ketakutan maupun keresahan. Semua individu dalam suasana rukun dapat berbuat wajar untuk mencapai tujuan hidup yang maksimal. Kerukunan dapat terbangun dengan ideal apabila setiap individu mengetahui prinsip-prinsip hubungan antar manusia yang ideal dan menerapkannya sehingga membuka peluang terwujudnya tata sosial yang ideal tersebut. Dalam hal ini ada dua (2) faktor penentu yaitu hukum dan manusia.

Dalam kerukunan ini, agama mendapat tempat yang paling utama dalam kehidupan manusia, bahkan melampaui budaya buatan manusia seperti politik,

ekonomi, ilmu dan teknologi serta seni. Alasannya adalah karena agama dipandang mempunyai kebenaran (hukum) yang jauh lebih lengkap (sempurna) daripada karya budaya. Berpegang kepada agama merupakan suatu jaminan yang mampu memberikan keselamatan. Semakin besar penyerahan manusia terhadap Tuhan semakin dekat dan merasa dekat dia dengan Tuhannya, sehingga akan mempertinggi martabatnya, dan sebaliknya.

## **B.2. Faktor Penyebab Konflik Antar Umat Beragama**

Mencakup pada empat pokok masalah, yakni sebagai berikut.

- a) Pendirian Rumah Ibadah.
- b) Penyiaran Agama.
- c) Bantuan Keagamaan dari Luar Negeri.
- d) Tenaga Asing Bidang Keagamaan.

Sementara itu UU hamidy (2003) menyebutkan bahwa kerukunan hidup beragama antara umat beragama akan mudah terganggu disebabkan sebagai berikut :

- a) Adanya perbedaan kitab suci yang menjadi pokok ajaran suatu agama
- b) Adanya perbedaan konsep keagamaan

## **B.3. Kehidupan Beragama Di Indonesia**

Menurut Team Penyusunan Naskah Monografi Kerukunan Hidup Beragama. (1981/1982) Bangsa Indonesia telah menjadikan kehidupan kerohanian beragama dari nenek moyangnya semenjak jaman dahulu kala dalam bentuk sederhana yaitu berupa simbol-simbol penyembahan pada benda-benda yang dianggap “sakti” dan “keramat.” Disamping itu, mereka juga melakukan penyembahan kepada sang dewa yang dianggap mempunyai kekuatan tersendiri di luar dirinya.

### **B.3.1. Hidup Keagamaan Sebelum Kemerdekaan**

Di zaman Kerajaan Majapahit atau kerajaan lain yang bercorak Hindu dan Budha terutama di Pulau Jawa, demikian besar perhatiannya terhadap kehidupan

keagamaan. Hal ini dapat dibuktikan dengan banyaknya candi-candi yang merupakan pusat-pusat kehidupan beragama bagi pemeluk agama Hindu dan Budha di masa lalu.

Setelah tersebarnya agama Nasrani dan Islam, kegiatan pembinaan dan kehidupan ajaran kedua agama samawi itu tetap menjadi pusat perhatian. Gereja dan Masjid didirikan dimana-mana sebagai bimbingan/ pembinaan kehidupan keagamaan.

### **B.3.2. Hubungan Dan Tata Pergaulan Antar Pemeluk Berlainan Agama**

Berdasarkan sejarah pertumbuhan dan perkembangan pemeluk dari berbagai agama yang berbeda corak dan daerah, maka hubungan dan tata pergaulan antar pemeluk yang berlainan agama juga berbeda-beda, tergantung pada sejauh mana percampuran antara pemeluk berlainan agama itu berkembang. Corak hubungan dan tata pergaulan dibagi atas 3 :

(1) Diwarnai satu unsur agama saja.

Dapat dilihat dari gejala-gejala kurang adanya komunikasi mengenai perikehidupan dan cara pelaksanaan ibadah pemeluk agama lain sangat dirasakan sensitif.

(2) Diwarnai dua unsur agama saja

(3) Diwarnai beberapa unsur agama saja

Pada corak kedua dan ketiga, komunikasi antar pemeluk berlainan agama terbuka secara wajar, maka rasa toleransi memegang peranan penting untuk menyatakan saling hormat dan menghargai, terutama dalam urusan yang menyangkut kekeluargaan seperti: dalam kegotong-royongan, saling mengunjungi pada upacara perkawinan, dan peristiwa kematian.

Hubungan dan tata pergaulan yang merupakan interaksi positif, berdasarkan hasil amatan dari berbagai pengamat , tidak disebabkan oleh pengaruh tekanan dari luar, baik dari pimpinan adat, atau dari pamong desa/ praja. Suasana kedamaian telah berurat berakar dalam pergaulan mereka semenjak beratus tahun, bahkan sudah melembaga dan berkembang sesuai dengan peredaran masa dan perubahan situasi setempat. Akhir-akhir ini secara

insedentil timbul letupan kekerasan disana sini di salah satu pihak karena adanya perbedaan doktrin dan adanya ambisi pribadi di kalangan pemeluk beragama.

UU hamidy (2003) menambahkan bahwa ada beberapa perkara yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama di Indonesia, yaitu:

a) Kerukunan hidup beragama antara sesama pemeluk suatu agama.

Kerukunan hidup beragama dalam suatu agama biasanya akan terganggu berkaitan dengan perbedaan dalam sejarah, beda penafsiran serta perlakuan terhadap teks (matan) daripada kitab suci. Bila persaingan antar agama cukup tajam atau ada semacam ancaman dari luar yang bersifat anti agama (atheis) maka pertentangan dalam masyarakat pemeluk suatu agama akan cenderung tumpul. Sebaliknya bila persaingan antar agama tidak terjadi atau tidak ada musuh bersama dari luar, maka pertentangan intern umat sering muncul. Ini hal yang wajar, karena antar pemeluk agama yang satu dengan yang lain berada dalam suasana kompetisi untuk mendapatkan umat sebanyak mungkin. Ketika kompetisi antar agama berkurang atau tidak ada musuh dari luar yang membahayakan, kompetisi beralih kepada persaingan antar sesama penganut agama yang terwujud dalam berbagai corak.

b) Kerukunan hidup beragama antara umat beragama dengan pemerintah.

Kerukunan hidup beragama dipengaruhi oleh hubungan antara umat beragama dengan pihak pemerintah. Jika hubungannya tidak harmonis, maka kerukunan akan rusak. Ketidakharmonisan bisa terjadi menyangkut berbagai hal:

- (1) Intervensi pemerintah terhadap upacara keagamaan yang melampaui batas, sehingga bisa merusak muatan ajaran suatu agama
- (2) Tindakan para aparat pemerintah terhadap individu atau suatu golongan umat beragama yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (3) Adanya oknum pemerintah yang mendukung atau menghasut baik terbuka maupun secara rahasia (diam-diam) terhadap kegiatan suatu kelompok umat beragama yang bersifat melanggar peraturan yang berlaku, sehingga perbuatan mereka meresahkan umat lain.

Dari 3 (tiga) dimensi kerukunan hidup beragama tersebut, pemerintah berperanan besar dalam mengatur lalu lintas pergaulan antar umat beragama, untuk mencegah perselisihan sedini mungkin, dengan cara membuat peraturan yang baik dan konsisten dalam pelaksanaannya, dimana pemerintah harus melindungi pihak yang benar, dan memberi peringatan bahkan sanksi pada pihak yang bersalah.

Menurut Ali Mursyid (2003) ada beberapa faktor yang mempengaruhi kondisi kerukunan antar umat beragama antara lain:

- a) Pada umumnya masyarakat setempat (pedesaan) masih bersifat homogen baik dalam beragama, etnis kultural, politik, ekonomi dan sosial.
- b) Efektifitas peranan pranata agama dan sosial dalam kehidupan keseharian, masyarakat mendukung terwujudnya nilai-nilai kebersamaan, persatuan, senasib, kepedulian sosial, serta kepatuhan terhadap tokoh-tokoh agama dan adat setempat yang banyak tercemar oleh dampak pembangunan dan globalisasi.
- c) Kebijakan dan keseriusan pemerintah yang didukung segenap aparat dan masyarakat yang bersikap waspada serta cepat bertindak bila muncul gejala kerukunan, dan mengaktifkan forum komunikasi serta dialog antar kelompok beragama dan sosial setempat dan sampai ketingkat yang lebih rendah.

Sedangkan yang menjadi potensi gangguan terhadap kerukunan beragama adalah:

- a) Persaingan politis yang kurang sehat
- b) Kesenjangan ekonomi dan sosial
- c) Rasa kedaerahan yang masih tebal dan otonomi daerah yang salah arah
- d) Pendirian rumah ibadah, kurangnya komunikasi, penyebaran agama yang tidak sesuai ketentuan serta perbedaan paham keagamaan (sempalan).

### **B.3.3. Hidup keagamaan setelah kemerdekaan**

Menurut Perkembangan kehidupan beragama di Indonesia setelah merdeka dapat dilihat pada kenyataan dibentuknya sebuah lembaga di bidang keagamaan yakni Departemen Agama dengan penetapan Pemerintah no. 1, tanggal 3 Januari

1946, dengan tugas pokok menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang agama. Penjabarannya sebagai berikut:

- a) Lebih memantapkan dan mengefektifkan DEPAG sebagai aparatur Pemerintah dalam melayani hajat sekaligus membimbing ke arah pengisian dan pengokohan Ideologi Pancasila sebagai dasar Negara.
- b) Meningkatkan pembinaan kerukunan hidup antar umat beragama sebagai bagian dari pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa serta pemantapan ketahanan Nasional.
- c) Peningkatan kerja sama antara DEPAG dengan departemen-departemen dan instansi-instansi Pemerintah pada umumnya.
- d) Peningkatan kerja sama dan pelayanan kepada majelis-majelis agama dan lembaga-lembaga keagamaan lainnya
- e) Peningkatan kerja sama dengan negara-negara dan lembaga-lembaga swasta luar negeri yang ada hubungannya dengan bidang tugas DEPAG.



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Populasi Dan Sampel**

Populasi dalam penelitian ini adalah Seluruh Pemuka Agama (Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, dan Budha) yang ada di kota Pekanbaru. Pemuka Agama adalah orang yang memimpin suatu ajaran agama. Sampelnya adalah Pemuka Agama yang ada di kota Pekanbaru sebanyak 25 orang dari masing-masing agama. Teknik pengambilan sampelnya adalah purposive sampling dengan kriteria yaitu:

1. Memahami ajaran agama yang dianutnya
2. Dianggap sebagai pemimpin dalam suatu agamanya
3. Memiliki jamaah atau pengikut
4. Berpengalaman sebagai pemimpin agama minimal 5 tahun.

#### **B. Data Dan Sumber Data**

Penelitian ini menggunakan data primer. Sumber data diperoleh dari hasil penyebaran angket kepada setiap responden. Data penelitian dikumpulkan melalui angket yang telah dipersiapkan sebelumnya dan responden diminta menjawab pertanyaan yang telah dibuat dalam angket tersebut sesuai dengan option jawaban dengan menggunakan modifikasi skala likert yaitu ada lima pilihan jawaban responden.

#### **C. Definisi Variabel Operasional Dan Pengukuran**

Adapun variabel dalam penelitian ini terbagi kepada tiga klasifikasi variabel yaitu : **Pertama** variabel bebas (*Independent variable*) adalah sejumlah nilai untuk mengukur variabel pemahaman pemuka agama meliputi :

1. Pemahaman bersifat Kognisi
2. Pemahaman bersifat Afeksi
3. Pemahaman bersifat Psikomotorik/ Konasi

*Kedua*, variabel bebas ( *Independen variable*) adalah sejumlah nilai untuk mengukur variable faktor yang mempengaruhi Implementasi PBM yaitu Sumber daya Manusia (SDM) Pemuka Agama, Regulasi dan Birokrat atau Aparatur Pemerintah. *Ketiga*, variabel terikat (*dependent Variable*) yaitu sejumlah nilai untuk mengukur pelaksanaan BPM no. 9/8 tahun 2006 tentang pembinaan kerukunan antar umat beragama.

Definisi operasional menurut Sofian Effendi (1987) merupakan petunjuk pelaksanaan bagaimana cara mengukur satu variabel. Adapun definisi dan pengukuran variabel operasional penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1. Definisi variabel operasional pemahaman pemuka agama (X1)**

Variabel operasional dari Pemahaman Pemuka Agama yang meliputi :

#### **a. Pemahaman bersifat Kognisi**

Adapun variabel operasional dari pemahaman bersifat kognisi adalah

- 1) Mengetahui dari fungsi PBM
- 2) Mengetahui tujaun PBM
- 3) Paham dengan fungsi kepala daerah dan FKUB dalam PBM
- 4) Mengetahui cara tahapan penyelesaian konflik agama menurut PBM
- 5) Mengetahui cara pendirian rumah Ibadah (IMB/ Surat izin Sementara)

#### **b. Pemahaman bersifat Afeksi**

Pemahaman bersifat Ranah afeksi adalah kemampuan yang berkaitan dengan perasaan, sikap, emosi, derajat, penerimaan atau penolakan terhadap objek. Variabel operasional terhadap pemahaman afeksi adalah :

- 1) Merasa Bertanggung jawab terhadap kerukunan Antar Umat Beragama
- 2) Merasa bertanggung jawab untuk mensosialisasikan PBM ketengah Umat

#### **b. Pemahaman bersifat psikomotorik / Konasi.**

Ranah psikomotorik adalah kemampuan melakukan pekerjaan dengan anggota badan (berkaitan dengan gerak fisik) yang ranah psikomotorik adalah gerak fisik, kordinasi dan kemampuan menggunakan

gerak motorik. Adapun variable operasional dari pemahaman psikomotorik atau konasi adalah sebagai berikut :

- 1) Melakukan dialog
- 2) Melakukan sosialisasi masalah kerukunan umat beragama terhadap umat
- 3) Saling berkoordinasi dalam mensikapi persoalan Interaksi antar Umat

## **2. Defenisi operasional Variabel Faktor yang mempengaruhi Implementasi PBM (X2)**

### **a. Faktor SDM Pemuka Agama**

- 1) Pendidikan yaitu tingkat pendidikan terakhir khalayak yang dibagi kepada empat tingkatan (1) Tamat sarjana lengkap (S1), (2) Tamatan diploma. (3) Tamat SLTA/ sederajat. (4) Tidak tamat SLTA/Sederajat
- 2) Pengalaman yaitu berkaitan berapa lama seorang pemuka agama sebagai pemimpin dalam umatnya seperti pengurus mesjid, gereja, kelenteng, vihara atau sebagai penceramah dalam umatnya
- 3) Motivasi yaitu apa yang mendorong seorang pemuka agama bersedia sebagai pemuka agama.

### **b. Faktor Regulasi.**

- 1) Peraturan Pemerintah dan Undang-Undang
- 2) Peraturan Daerah (Perda)
- 3) Peraturan Gubernur dan Walikota

### **c. Faktor Birokrat / Aparatur Pemerintah.**

- 1) Sikap Pemerintah pusat (Kemenag dan kemendagri)
- 2) Sikap Pemerintah Daerah (Gubernur dan Walikota)
- 3) Sikap Forum Kerukunan umat beragama (Provinsi dan Kota)

## **3. Defenisi operasional Variabel Implementasi PBM Menteri agama dan Meteri Dalam negeri Nomor : 9/8 Tahun 2006 tentang pembinaan kerukunan umat beragama (Y) adalah sebagai berikut :**

Maksud dari implementasi pelaksanaan PBM Menteri agama dan Meteri Dalam negeri Nomor : 9/8 Tahun 2006 tentang pembinaan kerukunan umat beragama adalah terlaksananya beberapa tujuan dari PMB tersebut. Adapaun variabel operasional dari Implementasi PBM adalah sebagai berikut :

- 1) Terlaksananya Dialog Antar Umat beragama
- 2) Terlaksananya penyelesaian konflik antar umat beragama melalui Dialog
- 3) Terlaksananya Dialog antar Pemuka Agama dengan Pemerintah
- 4) Terlaksananya konsisten serta mudah dalam Pengurusan pendirian rumah Ibadah
- 5) Terjalinnnya Kerjasama antara Ormas Agama
- 6) Terbentuknya FKUB Provinsi atau Kota

#### **D. Metode Analisis Data**

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari: analisis validitas dan reliabilitas, analisis deskriptif, analisis uji normalitas dan pengujian hipotesis dengan metode analisis korelasi dan regresi berganda dengan bantuan SPSS versi 17.

##### **D.1. Uji Validitas dan Reliabilitas**

Uji reabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang menjadi indikator variabel atau konstruk, kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataannya konsisten dari waktu-waktu. Sementara itu uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau validnya suatu kuesioner, dan kuesioner dikatakan valid apabila ia mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur.

##### **D.2. Analisis Deskriptif**

Analisis deskriptif yaitu proses pengumpulan, penyajian, dan meringkas berbagai karakteristik dari data untuk menggambarkan data tersebut secara

memadai. Adapun metode Analisis statistik deskriptif digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis diskriptif yaitu untuk mengetahui nilai rata-rata, minimum, maksimum dan deviasi standar dari variable dependen dari pemahaman pemuka agama terhadap PBM.

### **D.3. Uji Normalitas Residual**

Sebelum melakukan uji statistik, langkah awal yang harus dilakukan adalah screening terhadap data yang akan diolah. Salah satu asumsi penggunaan statistik parametrik adalah asumsi normality. Asumsinya adalah bahwa setiap variabel dan semua kombinasi linier dari variabel berdistribusi normal. Jika asumsi ini dipenuhi, maka nilai residual dari analisis juga berdistribusi normal dan independen.

Uji normalitas residual bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Ada dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan analisis grafik atau uji statistik.

### **D.4. Pengujian Hipotesis**

Sebelum melakukan pengujian hipotesis dilakukan penentuan nilai-nilai Pemahaman Pemuka Agama terhadap PBM dan Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan PBM yaitu SDM Pemuka Agama, Regulasi dan Sikap Birokrat/Aparatur pemerintah. Pengujian hipotesis haruslah memenuhi kriteria untuk menolak atau menerima  $H_a$  berdasarkan pada P-value, yaitu:  $P\text{-value} < \alpha$ , maka  $H_a$  tidak dapat ditolak (diterima).  $P\text{-value} > \alpha$ , maka  $H_a$  ditolak. Koefisien keyakinan (*confidence coefficient*) yang digunakan dalam penelitian ini adalah 95%.

Pengujian permasalahan pertama yaitu bagaimana pemahaman Pemuka Agama terhadap Pelaksanaan Pembinaan Kerukunan Antar umat Beragama (PBM), akan dilakukan dengan analisis korelasi. Analisis korelasi merupakan metode analisis penelitian yang menyelidiki adanya hubungan dua peubah atau lebih dan bila ada, mengukur tingginya derajat hubungan tersebut melalui sebuah

bilangan yang disebut *koefisien korelasi*. Rumus untuk menghitung koefisien korelasi ( $r$ ) yang dinyatakan dengan persamaan:

$$r = \frac{n \sum XY - \sum X \sum Y}{\sqrt{n \sum X^2 - (\sum X)^2} \sqrt{n \sum Y^2 - (\sum Y)^2}}$$

Hubungan variabel acak X dan Y yang membentuk garis lurus disebut korelasi linier. Arah korelasi dapat bernilai *positif*, *negatif*, atau nol, yakni sebagai berikut:

1. Korelasi positif ditunjukkan dengan nilai  $r = +1$ , artinya dua variabel cenderung berubah dalam arah yang sama.
2. Korelasi negatif ditunjukkan dengan nilai  $r = -1$ , artinya dua variabel cenderung berubah dalam arah yang berlawanan.
3. Tidak ada korelasi ditunjukkan dengan nilai  $r = 0$ , artinya dua variabel cenderung berubah tidak menentu (berpola acak).

Pengujian permasalahan kedua mengenai pengaruh Faktor SDM Pemuka Agama, Regulasi dan Sikap Birokrat/Aparatur pemerintah terhadap Pelaksanaan Pembinaan Kerukunan Antar umat Beragama (PBM), dianalisis dengan regresi linier berganda, dengan persamaan sebagai berikut:

$$Y = a_1 + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e \dots \dots \dots (2)$$

Keterangan:

- Y = Pelaksanaan PBM
- X1 = SDM Pemuka Agama
- X2 = Regulasi
- X3 = Sikap Birokrat/Aparatur pemerintah
- a<sub>1</sub> = konstanta
- b<sub>1,2,3</sub> = koefisien

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Analisis Deskriptif**

Penelitian ini memilih 5 pemuka agama yang terbesar di Indonesia sebagai sampel meliputi pemuka agama agama Islam, Kristen Katolik, Kristen Protestan, Hindu dan Budha. Tabel berikut menggambarkan jumlah data yang disebarkan pada pemuka agama tersebut dan jumlah data yang dapat digunakan dalam penelitian:

**Tabel 1**  
**Sampel Yang Digunakan Dalam Penelitian**

NO	Responden (Pemuka Agama)	Kuisisioner disebarkan	Kuisisioner Tidak Kembali	Kuisisioner Kembali
1	Agama Islam	25	0	25
2	Agama Kristen Katolik	25	7	18
3	Agama Kristen Protestan	25	0	25
4	Agama Hindu	25	1	24
5	Agama Budha	25	4	21
	Jumlah Sampel digunakan	125	12	113

Sumber: Data olahan,2012

Dari jumlah kuisisioner yang disebarkan yaitu sebanyak 125 lembar, tidak kembali sebanyak 12 lembar, sehingga jumlah sampel yang dapat digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 113 atau sebesar 90% ( $113/125 \times 100\%$ ). Data yang tidak kembali sebesar 10% ( $12/125 \times 100\%$ ) disebabkan oleh responden tidak mengembalikan kuisisioner yang diberikan kepadanya sesuai dengan jadwal penelitian.

#### **A.1. Analisis Deskriptif Pemahaman bersifat Kognisi**

Berdasarkan tabel 2, pemuka seluruh agama mengetahui fungsi Surat Putusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri (SPBM) tentang kerukunan antar umat beragama sebesar 44%. Pemuka agama yang tidak mengetahui hanya sebesar 9%.

<b>Tabel 2</b>			
<b>Tahu Fungsi Surat Putusan Bersama Menteri Agama dan menteri Dalam negeri (SPBM) tentang kerukunan antar umat beragama</b>			
<b>KETERANGAN</b>		<b>JAWABAN</b>	<b>PERSENTASE</b>
A	Sangat Tahu	15	13%
B	Cukup Tahu	24	21%
C	Tahu	50	44%
D	Kurang	14	12%
E	Tidak Tahu	10	9%
Jumlah		113	100%

Berdasarkan tabel 3, pemuka seluruh agama mengetahui tujuan Surat Putusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri (SPBM) tentang kerukunan antar umat beragama sebesar 41%. Pemuka agama yang tidak mengetahui hanya sebesar 7%

<b>Tabel 3</b>			
<b>Tahu Tujuan SPBM tentang kerukunan antar umat</b>			
<b>KETERANGAN</b>		<b>JAWABAN</b>	<b>PERSENTASE</b>
A	Sangat Tahu	8	7%
B	Cukup Tahu	26	23%
C	Tahu	46	41%
D	Kurang	25	22%
E	Tidak Tahu	8	7%
Jumlah		113	100%

Berdasarkan tabel 4, pemuka seluruh agama mengetahui Peranan Kepala Daerah dalam membina kerukunan antar umat beragama sesuai SPBM sebesar 51%. Pemuka agama yang tidak mengetahui hanya sebesar 10% dan pemuka agama yang *sangat* mengetahui sebesar 4%.

<b>Tabel 4</b>			
<b>Tahu Peranan Kepala Daerah dalam Membina Kerukunan antar Umat Beragama</b>			
<b>KETERANGAN</b>		<b>JAWABAN</b>	<b>PERSENTASE</b>
A	Sangat Tahu	5	4%
B	Cukup Tahu	18	16%
C	Tahu	58	51%
D	Kurang	21	19%
E	Tidak Tahu	11	10%
Jumlah		113	100%



Berdasarkan tabel 5, pemuka seluruh agama mengetahui Peranan FKUB dalam membina kerukunan antar umat beragama sesuai SPBM sebesar 43%. Pemuka agama yang tidak mengetahui hanya sebesar 10% dan pemuka agama yang *sangat* mengetahui sebesar 8%.

<b>Tabel 5</b>			
<b>Tahu Peranan FKUB dalam Membina Kerukunan antar Umat Beragama</b>			
<b>KETERANGAN</b>		<b>JAWABAN</b>	<b>PERSENTASE</b>
A	Sangat Tahu	9	8%
B	Cukup Tahu	21	19%
C	Tahu	49	43%
D	Kurang	23	20%
E	Tidak Tahu	11	10%
Jumlah		113	100%

Berdasarkan tabel 6, pemuka seluruh agama mengetahui cara menyelesaikan konflik antar umat beragama sesuai SPBM sebesar 46%. Pemuka agama yang tidak mengetahui hanya sebesar 9% dan pemuka agama yang *sangat* mengetahui sebesar 7%.

<b>Tabel 6</b>			
<b>Tahu Penyelesaian Konflik antar umat beragama sesuai SPBM tentang kerukunan antar umat beragama</b>			
<b>KETERANGAN</b>		<b>JAWABAN</b>	<b>PERSENTASE</b>
A	Sangat Tahu	8	7%
B	Cukup Tahu	17	15%
C	Tahu	52	46%
D	Kurang	26	23%
E	Tidak Tahu	10	9%
Jumlah		113	100%

Berdasarkan tabel 7, pemuka seluruh agama mengetahui prosedur pendirian rumah ibadah sesuai SPBM sebesar 47%. Pemuka agama yang tidak mengetahui hanya sebesar 6% dan pemuka agama yang *sangat* mengetahui sebesar 10%.

<b>Tabel 7</b>			
<b>Tahu Prosedur Pendirian Rumah Ibadah dan IMB sesuai SPBM tentang kerukunan antar umat</b>			
	<b>KETERANGAN</b>	<b>JAWABAN</b>	<b>PERSENTASE</b>
A	Sangat Tahu	11	10%
B	Cukup Tahu	26	23%
C	Tahu	53	47%
D	Kurang	16	14%
E	Tidak Tahu	7	6%
Jumlah		113	100%

## A.2. Analisis Deskriptif Pemahaman bersifat Afeksi

Berdasarkan tabel 8, pemuka seluruh agama setuju bertanggung jawab untuk membina kerukunan antar umat beragama sebesar 22%. Pemuka agama yang tidak setuju sebesar 0% dan pemuka agama yang *sangat* setuju sebesar 65%.

<b>Tabel 8</b>			
<b>Pemuka agama merasa bertanggung jawab untuk membina kerukunan antar umat beragama</b>			
	<b>KETERANGAN</b>	<b>JAWABAN</b>	<b>PERSENTASE</b>
A	Sangat Setuju	74	65%
B	Cukup Setuju	8	7%
C	Setuju	25	22%
D	Kurang Setuju	6	5%
E	Tidak Setuju	0	0%
Jumlah		113	100%

Berdasarkan tabel 9, pemuka seluruh agama sering mensosialisasikan PBM ketengah umat beragama sebesar 48%. Pemuka agama yang tidak pernah sebesar 5% dan pemuka agama yang *sangat* sering sebesar 15%.

<b>Tabel 9</b>			
<b>Pemuka agama merasa bertanggung jawab untuk mensosialisasikan PBM ketengah umat</b>			
	<b>KETERANGAN</b>	<b>JAWABAN</b>	<b>PERSENTASE</b>
A	Sangat Sering	17	15%
B	Cukup Sering	19	17%
C	Sering	54	48%
D	Kurang Sering	17	15%
E	Tidak Pernah	6	5%
Jumlah		113	100%

### A.3. Analisis Deskriptif Pemahaman bersifat Konasi

Berdasarkan tabel 10, pemuka agama sering dialog dengan teman seagama perlunya pembinaan kerukunan antar umat beragama sebesar 42%. Pemuka agama yang tidak pernah sebesar 5% dan pemuka agama yang *sangat* sering sebesar 14%.

<b>Tabel 10</b>			
<b>Dialog dengan teman seagama mengenai perlunya pembinaan kerukunan antar umat beragama</b>			
<b>KETERANGAN</b>		<b>JAWABAN</b>	<b>PERSENTASE</b>
A	Sangat Sering	16	14%
B	Cukup Sering	30	27%
C	Sering	48	42%
D	Kurang Sering	13	12%
E	Tidak Pernah	6	5%
Jumlah		113	100%

Berdasarkan tabel 11, pemuka agama sering dialog dengan teman tidak seagama perlunya pembinaan kerukunan antar umat beragama sebesar 42%. Pemuka agama yang tidak pernah sebesar 8% dan pemuka agama yang *sangat* sering sebesar 9%.

<b>Tabel 11</b>			
<b>Dialog dengan teman tidak seagama mengenai perlunya pembinaan kerukunan antar umat</b>			
<b>KETERANGAN</b>		<b>JAWABAN</b>	<b>PERSENTASE</b>
A	Sangat Sering	10	9%
B	Cukup Sering	25	22%
C	Sering	48	42%
D	Kurang Sering	21	19%
E	Tidak Pernah	9	8%
Jumlah		113	100%

Berdasarkan tabel 12, pemuka agama sering sosialisasi dengan Teman-Teman seagama perlunya pembinaan kerukunan antar umat beragama sebesar 47%. Pemuka agama yang tidak pernah sebesar 4% dan pemuka agama yang *sangat* sering sebesar 9%.

<b>Tabel 12</b>			
<b>Sosialisasi dengan teman seagama mengenai perlunya pembinaan kerukunan antar umat</b>			
<b>KETERANGAN</b>		<b>JAWABAN</b>	<b>PERSENTASE</b>
A	Sangat Sering	10	9%
B	Cukup Sering	26	23%
C	Sering	53	47%
D	Kurang Sering	19	17%
E	Tidak Pernah	5	4%
Jumlah		113	100%

Berdasarkan tabel 13, pemuka agama sering sosialisasi dengan Teman-Teman tidak seagama perlunya pembinaan kerukunan antar umat beragama sebesar 47%. Pemuka agama yang tidak pernah sebesar 6% dan pemuka agama yang *sangat* sering sebesar 10%.

<b>Tabel 13</b>			
<b>Sosialisasi dengan teman tidak seagama mengenai perlunya pembinaan kerukunan antar umat</b>			
<b>KETERANGAN</b>		<b>JAWABAN</b>	<b>PERSENTASE</b>
A	Sangat Sering	11	10%
B	Cukup Sering	26	23%
C	Sering	53	47%
D	Kurang Sering	16	14%
E	Tidak Pernah	7	6%
Jumlah		113	100%

Berdasarkan tabel 14, pemuka agama sering berkoordinasi dengan Teman-Teman seagama atau tidak seagama mengenai Interaksi dan perlunya pembinaan kerukunan antar umat beragama sebesar 49%. Pemuka agama yang tidak pernah sebesar 9% dan pemuka agama yang *sangat* sering sebesar 10%.

<b>Tabel 14</b>			
<b>Saling koordinasi dengan teman seagama dan tidak seagama mengenai interaksi dan perlunya pembinaan kerukunan antar umat beragama</b>			
<b>KETERANGAN</b>		<b>JAWABAN</b>	<b>PERSENTASE</b>
A	Sangat Sering	11	10%
B	Cukup Sering	18	16%
C	Sering	55	49%
D	Kurang Sering	19	17%
E	Tidak Pernah	10	9%
Jumlah		113	100%

#### A.4. Analisis Deskriptif Sumber Daya Manusia Pemuka Agama

Berdasarkan tabel 15, pendidikan terakhir pemuka agama tamatan S1 sebanyak 50%, tamatan diploma 15%, dan tamatan SLTA 25% serta tamatan SLTP sebanyak 10%.

	<b>KETERANGAN</b>	<b>JAWABAN</b>	<b>PERSENTASE</b>
A	Tamat S1	57	50%
B	Tamat Diploma	17	15%
C	Tamat SLTA	28	25%
D	Tamat SLTP	11	10%
E	Tamat SD	0	0%
Jumlah		113	100%

Berdasarkan tabel 16, keterlibatan pemuka agama dalam membina umat adalah yang terbanyak selama 7 sampai 10 tahun sebesar 25%, kurang dari 5 tahun sebesar 22%, serta lebih dari 12 tahun sebesar 23%

	<b>KETERANGAN</b>	<b>JAWABAN</b>	<b>PERSENTASE</b>
A	lebih 12 tahun	26	23%
B	10 sampai 12 Tahun	16	14%
C	7 sampai 10 tahun	28	25%
D	5 samapi 7 Tahun	18	16%
E	kurang dari 5 Tahun	25	22%
Jumlah		113	100%

Berdasarkan tabel 17, motivasi pemuka agama terlibat dalam membina umat yang terbesar dikarenakan panggilan agama (sukarela) sebesar 59%. Alasan panggilan tugas sebesar 20%, untuk menambah penghasilan 13%, dan karena tidak ada pekerjaan lain sebesar 7%.

	<b>KETERANGAN</b>	<b>JAWABAN</b>	<b>PERSENTASE</b>
A	Karena Panggilan Agama (sukarela)	67	59%
B	Karena Panggilan Tugas	23	20%
C	Untuk menambah Penghasilan	15	13%
D	Karena Tidak ada Pekerjaan Yang lain	8	7%
E	Karena Ingin dikenal dll	0	0%
Jumlah		113	100%

### A.5. Analisis Deskriptif Regulasi.

Berdasarkan tabel 18, pemuka agama menyatakan Peraturan dan Undang-Undang Negara berpengaruh terhadap Implementasi PBM dalam pembinaan kerukunan antar umat beragama sebesar 43%, dan yang menyatakan tidak berpengaruh sebesar 12%, serta yang menyatakan *sangat* berpengaruh sebesar 21%.

KETERANGAN		JAWABAN	PERSENTASE
A	Sangat berpengaruh	24	21%
B	Cukup ada pengaruh	13	12%
C	Berpengaruh	49	43%
D	Kurang berpengaruh	14	12%
E	Tidak berpengaruh	13	12%
Jumlah		113	100%

Berdasarkan tabel 19, pemuka agama menyatakan ada Pengaruh *Peraturan Daerah (PERDA)* terhadap Implementasi PBM dalam pembinaan kerukunan antar umat beragama sebesar 44%, dan yang menyatakan tidak berpengaruh sebesar 11%, serta yang menyatakan *sangat* berpengaruh sebesar 17%.

KETERANGAN		JAWABAN	PERSENTASE
A	Sangat berpengaruh	19	17%
B	Cukup ada pengaruh	17	15%
C	Berpengaruh	50	44%
D	Kurang berpengaruh	15	13%
E	Tidak berpengaruh	12	11%
Jumlah		113	100%

Berdasarkan tabel 20, pemuka agama menyatakan ada Pengaruh *Peraturan Gubernur / Walikota/ Bupati* terhadap Implementasi PBM dalam pembinaan kerukunan antar umat beragama sebesar 45%, dan yang menyatakan tidak berpengaruh sebesar 8%, serta yang menyatakan *sangat* berpengaruh sebesar 19%.

KETERANGAN		JAWABAN	PERSENTASE
A	Sangat berpengaruh	21	19%
B	Cukup ada pengaruh	17	15%
C	Berpengaruh	51	45%
D	Kurang berpengaruh	15	13%
E	Tidak berpengaruh	9	8%
Jumlah		113	100%

#### A.6. Analisis Deskriptif Sikap Birokrat / Aparatur Pemerintah.

Berdasarkan tabel 21, pemuka agama menyatakan ada Pengaruh *Sikap Birokrat/ Aparatur Pemerintah Pusat* terhadap Implementasi PBM dalam pembinaan kerukunan antar umat beragama sebesar 42%, dan yang menyatakan tidak berpengaruh sebesar 10%, serta yang menyatakan *sangat* berpengaruh sebesar 21%.

	KETERANGAN	JAWABAN	PERSENTASE
A	Sangat berpengaruh	24	21%
B	Cukup ada pengaruh	13	12%
C	Berpengaruh	47	42%
D	Kurang berpengaruh	18	16%
E	Tidak berpengaruh	11	10%
	Jumlah	113	100%

Berdasarkan tabel 22, pemuka agama menyatakan ada Pengaruh *Sikap Birokrat/ Aparatur Pemerintah Daerah* terhadap Implementasi PBM dalam pembinaan kerukunan antar umat beragama sebesar 42%, dan yang menyatakan tidak berpengaruh sebesar 8%, serta yang menyatakan *sangat* berpengaruh sebesar 15%.

	KETERANGAN	JAWABAN	PERSENTASE
A	Sangat berpengaruh	17	15%
B	Cukup ada pengaruh	19	17%
C	Berpengaruh	48	42%
D	Kurang berpengaruh	20	18%
E	Tidak berpengaruh	9	8%
	Jumlah	113	100%

Berdasarkan tabel 23, pemuka agama menyatakan ada Pengaruh *Sikap FKUB* terhadap Implementasi PBM dalam pembinaan kerukunan antar umat beragama sebesar 40%, dan yang menyatakan tidak berpengaruh sebesar 9%, serta yang menyatakan *sangat* berpengaruh sebesar 12%.

	KETERANGAN	JAWABAN	PERSENTASE
A	Sangat berpengaruh	14	12%
B	Cukup ada pengaruh	20	18%
C	Berpengaruh	45	40%
D	Kurang berpengaruh	24	21%
E	Tidak berpengaruh	10	9%
	Jumlah	113	100%

### A.7. Analisis Deskriptif Implementasi Pelaksanaan SKPBM Nomor : 9/8 Tahun 2006

Berdasarkan tabel 24, pemuka agama melakukan Dialog Antar Umat Beragama dalam 5 tahun terakhir sebanyak 3 sampai 7 kali sebanyak 21%, kurang dari 3 kali sebanyak 30%, dan lebih dari 10 kali sebanyak 16%.

<b>KETERANGAN</b>			<b>JAWABAN</b>	<b>PERSENTASE</b>
A	lebih dari 10 kali	18	16%	
B	7 sampai 10 kali	13	12%	
C	5 sampai 7 kali	24	21%	
D	3 samapi 5 kali	24	21%	
E	kurang dari 3 kali	34	30%	
Jumlah		113	100%	

Berdasarkan tabel 25 keterlibatan pemuka agama dalam menyelesaikan konflik agama baik secara internal maupun eksternal dalam 5 tahun terakhir, adalah kurang dari 3 kali sebanyak 43%, dan 5 sampai 7 kali 24%, dan lebih dari 10 kali sebesar 12%.

<b>KETERANGAN</b>			<b>JAWABAN</b>	<b>PERSENTASE</b>
A	lebih dari 10 kali	14	12%	
B	7 sampai 10 kali	7	6%	
C	5 sampai 7 kali	27	24%	
D	3 samapi 5 kali	16	14%	
E	kurang dari 3 kali	49	43%	
Jumlah		113	100%	

Berdasarkan tabel 26, pemuka agama mengikuti atau diundang berdialog antar Pemuka Agama dengan Pemerintah dalam 5 tahun terakhir, kurang dari 3 kali sebesar 47%, dan lebih dari 10 kali sebanyak 12%

<b>KETERANGAN</b>			<b>JAWABAN</b>	<b>PERSENTASE</b>
A	lebih dari 10 kali	13	12%	
B	7 sampai 10 kali	14	12%	
C	5 sampai 7 kali	20	18%	
D	3 samapi 5 kali	13	12%	
E	kurang dari 3 kali	53	47%	
Jumlah		113	100%	



Berdasarkan tabel 27, pemuka agama menyatakan pelaksanaan SKPBM Nomor 9/8 Tahun 2006, tentang Kerukunan Antar Umat beragama telah Konsisten dilaksanakan sebanyak 35%, tidak konsisten 22%, dan *sangat* konsisten sebesar 9%.

<b>Tabel 27</b>		
<b>Pelaksanaan SKPBM Nomor 9/8 Tahun 2006, tentang Kerukunan Antar Umat beragama telah Konsisten</b>		
<b>KETERANGAN</b>	<b>JAWABAN</b>	<b>PERSENTASE</b>
A Sangat Konsisten	10	9%
B Cukup Konsisten	18	16%
C Konsisten	39	35%
D Kurang Konsisten	21	19%
E Tidak Konsisten	25	22%
Jumlah	113	100%

Berdasarkan tabel 28, pemuka agama menyatakan pelaksanaan SKPBM Nomor 9/8 Tahun 2006, tentang Kerukunan Antar Umat beragama telah Konsisten dilaksanakan dalam hal Pendirian Rumah Ibadah sebanyak 33%, tidak konsisten 25%, dan *sangat* konsisten sebesar 8%.

<b>Tabel 28</b>		
<b>Pelaksanaan SKPBM Nomor 9/8 Tahun 2006, tentang Kerukunan Antar Umat beragama telah Konsisten dilaksanakan, dalam hal Pendirian Rumah Ibadah</b>		
<b>KETERANGAN</b>	<b>JAWABAN</b>	<b>PERSENTASE</b>
A Sangat Konsisten	9	8%
B Cukup Konsisten	15	13%
C Konsisten	37	33%
D Kurang Konsisten	24	21%
E Tidak Konsisten	28	25%
Jumlah	113	100%

Berdasarkan tabel 29, pemuka agama menyatakan bahwa ORMAS Agama sering melakukan Kerjasama dengan ORMAS Agama Lain dalam lima tahun terkahir ini sebesar 33%, tidak pernah 16% dan sangat sering sebesar 11%.

<b>Tabel 29</b>		
<b>Kerjasama dengan ORMAS Agama Lain dalam lima tahun terkahir ini</b>		
<b>KETERANGAN</b>	<b>JAWABAN</b>	<b>PERSENTASE</b>
A Sangat Sering	12	11%
B Cukup Sering	13	12%
C Sering	37	33%
D Kurang Sering	33	29%
E Tidak pernah	18	16%
Jumlah	113	100%

Berdasarkan tabel 30, pemuka agama menyatakan bahwa FKUB baik Tingkat provinsi maupun Kota/Kabupaten, telah memberikan kontribusi atau manfaat terhadap Pembinaan kerukunan antar Umat Beragama di Daerahnya sebanyak 40%, tidak ada manfaat sebanyak 16%, dan yang menyatakan sangat bermanfaat sebesar 15%.

<b>Tabel 30</b>			
<b>Kontribusi FKUB baik Tingkat provinsi maupun Kota/Kabupaten terhadap Pembinaan kerukunan antar Umat Beragama</b>			
	<b>KETERANGAN</b>	<b>JAWABAN</b>	<b>PERSENTASE</b>
A	Sangat bermanfaat	17	15%
B	Cukup Bermafaat	12	11%
C	Bermanfaat	45	40%
D	Kurang bermanfaat	21	19%
E	Tidak bermanfaat	18	16%
	Jumlah	113	100%

## **B. UJI RELIABILITAS DAN VALIDITAS**

### **B.1. UJI RELIABILITAS**

#### **B.1.1. Uji Reliabilitas Pemahaman Pemuka Agama (kognisi, afeksi dan konasi)**

Berikut ini disajikan hasil uji reliabilitas untuk instrumen pemahaman pemuka agama secara kognisi, afeksi dan konasi yang dapat dilihat dari nilai cronbach's alpha 0,880 diatas 0,60 (Nunly,1960). Artinya seluruh instrumen yang dibentuk dalam menyatakan pemahaman pemuka agama dari sisi kognisi, afeksi dan konasi adalah reliabel.

**Tabel 31**  
**Uji Reliabilitas Pemahaman Pemuka Agama (kognisi, afeksi dan konasi)**

<b>Reliability Statistics</b>		
Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.880	.880	13

<b>Scale Statistics</b>			
Mean	Variance	Std. Deviation	N of Items
40.95	73.086	8.549	13

**Item-Total Statistics**

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Squared Multiple Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Kognitif.1	37.77	61.643	.595	.805	.870
Kognitif.2	37.94	62.951	.566	.798	.871
Kognitif.3	38.08	62.628	.636	.710	.868
Kognitif.4	38.00	61.982	.604	.612	.869
Kognitif.5	38.06	61.059	.700	.607	.864
Kognitif.6	37.79	62.347	.620	.527	.868
Afektif 7	36.62	69.327	.167	.204	.891
Afektif 8	37.73	61.625	.630	.503	.868
Konatif 9	37.62	62.970	.554	.522	.872
Konatif 10	37.89	62.792	.557	.561	.872
Konatif 11	37.80	63.092	.598	.484	.870
Konatif 12	38.12	62.181	.551	.610	.872
Konatif 13	37.94	63.059	.542	.609	.872

**B.1.2. Uji Reliabilitas Implementasi Peraturan Bersama Menteri (PBM)**

Hasil uji reliabilitas untuk instrumen implementasi Peraturan Bersama Menteri dalam pembinaan kerukunan umat beragama yang dapat dilihat dari nilai cronbach's alpha 0,912 diatas 0,60 (Nunly,1960). Artinya seluruh instrumen yang dibentuk dalam menyatakan implementasi Peraturan Bersama Menteri dalam pembinaan kerukunan umat beragama adalah reliabel.

**Tabel 32**  
**Uji Reliabilitas Implementasi Peraturan Bersama Menteri (PBM)**

**Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.912	.915	7

**Scale Statistics**

Mean	Variance	Std. Deviation	N of Items
18.13	55.259	7.434	7

**Item-Total Statistics**

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Squared Multiple Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Implementasi 23	15.51	41.752	.621	.429	.912
Implementasi 24	15.83	40.052	.747	.669	.898
Implementasi 25	15.83	39.498	.749	.673	.898
Implementasi 26	15.42	41.104	.802	.754	.892
Implementasi 27	15.55	41.161	.803	.784	.892
Implementasi 28	15.42	43.102	.692	.550	.903
Implementasi 29	15.23	41.679	.753	.654	.897

**B.1.3. Uji Reliabilitas Regulasi**

Hasil uji reliabilitas untuk instrumen regulasi pemerintah yang dapat dilihat dari nilai cronbach's alpha 0,896 diatas 0,60 (Nunly,1960). Artinya seluruh instrumen yang dibentuk dalam regulasi pemerintah adalah reliabel.

**Tabel 33**  
**Uji Reliabilitas Regulasi**

**Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	N of Items
.896	3

**Item-Total Statistics**

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Regulasi 17	6.37	4.486	.847	.807
Regulasi 18	6.42	4.834	.823	.829
Regulasi.19	6.33	5.329	.723	.912

**Scale Statistics**

Mean	Variance	Std. Deviation	N of Items
9.56	10.445	3.232	3

#### B.1.4. Uji Reliabilitas Sikap Aparatur Pemerintah

Hasil uji reliabilitas untuk instrumen sikap aparatur pemerintah yang dapat dilihat dari nilai cronbach's alpha 0,883 diatas 0,60 (Nunly,1960). Artinya seluruh instrumen yang dibentuk dalam sikap aparatur pemerintah adalah reliabel.

**Tabel 34**  
**Uji Reliabilitas Sikap Aparatur Pemerintah**  
**Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	N of Items
.883	3

#### Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Sikap.20	6.17	4.123	.830	.784
Sikap 21	6.22	4.460	.847	.771
Sikap 22	6.32	5.148	.658	.931

#### Scale Statistics

Mean	Variance	Std. Deviation	N of Items
9.35	9.731	3.119	3

## B.2. Uji Validitas

### B.2.1. Uji Validitas pemahaman pemuka agama secara kognisi

Berdasarkan tabel 35 diperoleh bahwa instrumen yang dibentuk untuk mewakili pertanyaan pemahaman pemuka agama secara kognisi menunjukkan signifikansi dibawah 0,005. Artinya pertanyaan yang dibentuk untuk menyatakan pemahaman pemuka agama secara kognisi adalah valid.

### B.2.2. Uji Validitas pemahaman pemuka agama secara afeksi

Berdasarkan tabel 36 diperoleh bahwa instrumen yang dibentuk untuk mewakili pertanyaan pemahaman pemuka agama secara afeksi menunjukkan signifikansi dibawah 0,005. Artinya pertanyaan yang dibentuk untuk menyatakan pemahaman pemuka agama secara afeksi adalah valid.

**Tabel 35**  
**Uji Validitas pemahaman pemuka agama secara kognisi**  
**Correlations**

		Kognisi.1	Kognisi.2	Kognisi.3	Kognisi.4	Kognisi.5	Kognisi.6	Total Kognisi (X1)
Kognisi.1	Pearson Correlation	1	.859**	.692**	.652**	.585**	.538**	.876**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	113	113	113	113	113	113	113
Kognisi.2	Pearson Correlation	.859**	1	.725**	.613**	.500**	.529**	.853**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000	.000	.000
	N	113	113	113	113	113	113	113
Kognisi.3	Pearson Correlation	.692**	.725**	1	.709**	.656**	.608**	.880**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000	.000	.000
	N	113	113	113	113	113	113	113
Kognisi.4	Pearson Correlation	.652**	.613**	.709**	1	.568**	.520**	.819**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000	.000	.000
	N	113	113	113	113	113	113	113
Kognisi.5	Pearson Correlation	.585**	.500**	.656**	.568**	1	.588**	.782**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000		.000	.000
	N	113	113	113	113	113	113	113
Kognisi.6	Pearson Correlation	.538**	.529**	.608**	.520**	.588**	1	.758**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000		.000
	N	113	113	113	113	113	113	113
Total Kognisi (X1)	Pearson Correlation	.876**	.853**	.880**	.819**	.782**	.758**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	113	113	113	113	113	113	113

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

**Tabel 36**  
**Uji Validitas pemahaman pemuka agama secara afeksi**  
**Correlations**

		Afeksi 7	Afeksi 8	Total Afeksi (X1)
Afeksi 7	Pearson Correlation	1	.224*	.769**
	Sig. (2-tailed)		.017	.000
	N	113	113	113
Afeksi 8	Pearson Correlation	.224*	1	.795**
	Sig. (2-tailed)	.017		.000
	N	113	113	113
Total Afeksi (X1)	Pearson Correlation	.769**	.795**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	
	N	113	113	113

\*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

\*\*. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

### **B.2.3. Uji Validitas pemahaman pemuka agama secara konasi**

Berdasarkan tabel 37 diperoleh bahwa instrumen yang dibentuk untuk mewakili pertanyaan pemahaman pemuka agama secara konasi menunjukkan signifikansi dibawah 0,005. Artinya pertanyaan yang dibentuk untuk menyatakan pemahaman pemuka agama secara konasi adalah valid.

### **B.2.4. Uji Validitas Implementasi Peraturan Bersama Menteri (PBM) dalam pembinaan kerukunan umat beragama**

Berdasarkan tabel 38 diperoleh bahwa instrumen yang dibentuk untuk mewakili pertanyaan implemtasi PBM dalam pembinaan kerukunan umat beragama menunjukkan signifikansi dibawah 0,005. Artinya pertanyaan yang dibentuk untuk menyatakan implemtasi PBM dalam pembinaan kerukunan umat beragama adalah valid.

**Tabel 37**  
**Uji Validitas pemahaman pemuka agama secara konasi**  
**Correlations**

		Konasi 9	Konasi 10	Konasi 11	Konasi 12	Konasi 13	Total Konasi (X1)
Konasi 9	Pearson Correlation	1	.632**	.493**	.488**	.523**	.788**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000	.000
	N	113	113	113	113	113	113
Konasi 10	Pearson Correlation	.632**	1	.467**	.555**	.568**	.812**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000	.000
	N	113	113	113	113	113	113
Konasi 11	Pearson Correlation	.493**	.467**	1	.445**	.484**	.715**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000	.000
	N	113	113	113	113	113	113
Konasi 12	Pearson Correlation	.488**	.555**	.445**	1	.728**	.819**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000	.000
	N	113	113	113	113	113	113
Konasi 13	Pearson Correlation	.523**	.568**	.484**	.728**	1	.835**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000		.000
	N	113	113	113	113	113	113
Total Konasi (X1)	Pearson Correlation	.788**	.812**	.715**	.819**	.835**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	113	113	113	113	113	113

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).



**Tabel 38**  
**Uji Validitas Implementasi Peraturan Bersama Menteri (PBM) dalam**  
**pembinaan kerukunan umat beragama**

**Correlations**

		Imple mentas i 23	Implem entasi 24	Imple mentas i 25	Implem entasi 26	Imple mentas i 27	Implem entasi 28	Implem entasi 29	Total Implemen tasi (Y)
Imple mentas i 23	Pearson Correlation	1	.589**	.568**	.495**	.471**	.516**	.458**	.732**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	113	113	113	113	113	113	113	113
Imple mentas i 24	Pearson Correlation	.589**	1	.790**	.585**	.569**	.526**	.567**	.824**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	113	113	113	113	113	113	113	113
Imple mentas i 25	Pearson Correlation	.568**	.790**	1	.620**	.595**	.492**	.578**	.828**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000	.000	.000	.000
	N	113	113	113	113	113	113	113	113
Imple mentas i 26	Pearson Correlation	.495**	.585**	.620**	1	.839**	.624**	.766**	.857**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000	.000	.000	.000
	N	113	113	113	113	113	113	113	113
Imple mentas i 27	Pearson Correlation	.471**	.569**	.595**	.839**	1	.707**	.769**	.858**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000		.000	.000	.000
	N	113	113	113	113	113	113	113	113
Imple mentas i 28	Pearson Correlation	.516**	.526**	.492**	.624**	.707**	1	.584**	.770**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000		.000	.000
	N	113	113	113	113	113	113	113	113
Imple mentas i 29	Pearson Correlation	.458**	.567**	.578**	.766**	.769**	.584**	1	.821**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000		.000
	N	113	113	113	113	113	113	113	113
Total Imple mentas i (Y)	Pearson Correlation	.732**	.824**	.828**	.857**	.858**	.770**	.821**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	113	113	113	113	113	113	113	113

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

### B.2.5. Uji Validitas Sumber Daya Manusia Pemuka Agama

Berdasarkan tabel 39 diperoleh bahwa instrumen yang dibentuk untuk mewakili pertanyaan sumber daya manusia pemuka agama menunjukkan signifikansi dibawah 0,005. Artinya pertanyaan yang dibentuk untuk menyatakan sumber daya manusia pemuka agama adalah valid.

**Tabel 39**  
**Uji Validitas Sumber Daya Manusia Pemuka Agama**

<b>Correlations</b>				
	Sumber Daya Manusia .14	Sumber Daya Manusia .15	Sumber Daya Manusia .16	Sumber Daya Manusia X2
Sumber Daya Manusia.14	1	-.212*	.355**	.547**
Sig. (2-tailed)		.025	.000	.000
N	113	113	113	113
Sumber Daya Manusia .15	-.212*	1	-.070	.578**
Sig. (2-tailed)	.025		.459	.000
N	113	113	113	113
Sumber Daya Manusia 16	.355**	-.070	1	.613**
Sig. (2-tailed)	.000	.459		.000
N	113	113	113	113
Sumber Daya Manusia .X2	.547**	.578**	.613**	1
Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	
N	113	113	113	113

\*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

### B.2.6. Uji Validitas Regulasi

Berdasarkan tabel 40 diperoleh bahwa instrumen yang dibentuk untuk mewakili pertanyaan regulasi pemerintah menunjukkan signifikansi dibawah 0,005. Artinya pertanyaan yang dibentuk untuk menyatakan regulasi pemerintah adalah valid.

**Tabel 40**  
**Uji Validitas Regulasi**

**Correlations**

		Regulasi..17	Regulasi 18	Regulasi..19	Regulasi..X2
Regulasi.17	Pearson Correlation	1	.839**	.710**	.937**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000
	N	113	113	113	113
Regulasi..18	Pearson Correlation	.839**	1	.676**	.922**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000
	N	113	113	113	113
Regulasi.19	Pearson Correlation	.710**	.676**	1	.870**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000
	N	113	113	113	113
Regulasi.X2	Pearson Correlation	.937**	.922**	.870**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	
	N	113	113	113	113

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

**B.2.7. Uji Validitas Sikap Aparatur Pemerintah**

Berdasarkan tabel 41 diperoleh bahwa instrumen yang dibentuk untuk mewakili pertanyaan sikap aparatur pemerintah menunjukkan signifikansi dibawah 0,005. Artinya pertanyaan yang dibentuk untuk menyatakan sikap aparatur pemerintah adalah valid.

**Tabel 41**  
**Uji Validitas Sikap Aparatur Pemerintah**  
**Correlations**

		Sikap.20	Sikap.21	Sikap..22	Sikap.X2
Sikap.20	Pearson Correlation	1	.874**	.630**	.932**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000
	N	113	113	113	113
Sikap..21	Pearson Correlation	.874**	1	.644**	.933**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000
	N	113	113	113	113
Sikap.22	Pearson Correlation	.630**	.644**	1	.837**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000
	N	113	113	113	113
Sikap.X2	Pearson Correlation	.932**	.933**	.837**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	
	N	113	113	113	113

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

## **C. UJI NORMALITAS RESIDUAL**

Sebelum melakukan uji statistik, langkah awal yang harus dilakukan adalah screening terhadap data yang akan diolah. Salah satu asumsi penggunaan statistik parametrik adalah asumsi normality. Asumsinya adalah bahwa setiap variabel dan semua kombinasi linier dari variabel berdistribusi normal. Jika asumsi ini dipenuhi, maka nilai residual dari analisis juga berdistribusi normal dan independen.

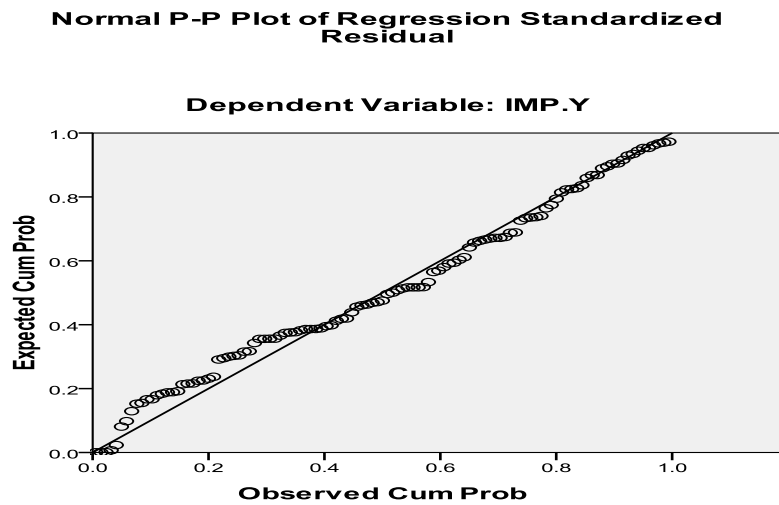
Uji normalitas residual bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Ada dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan analisis grafik atau uji statistik.

### **C.1. Analisis Grafik**

Salah satu cara untuk melihat normalitas residual adalah dengan melihat normal probability plot yang membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Distribusi normal akan membentuk satu garis lurus diagonal, dan plotting data residual akan dibandingkan dengan garis diagonal. Jika distribusi data residual normal, maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya. Dasar pengambilan keputusannya adalah jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.

Berdasarkan grafik 1, data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi dalam penelitian ini memenuhi asumsi normalitas.

### **Grafik 1 Normalitas Residual**



## C.2. Analisis Statistik

Uji statistik lain yang dapat digunakan untuk menguji normalitas residual adalah uji statistik non-parametrik Kolmogorov-Smirnov (K-S). Uji K-S dilakukan dengan membuat hipotesis:

Ho: data residual berdistribusi normal

Ha: data residual tidak berdistribusi normal

**Tabel 42**  
**Normalitas Residual**  
**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		113
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	6.06449109
Most Extreme Differences	Absolute	.079
	Positive	.057
	Negative	-.079
Kolmogorov-Smirnov Z		.835
Asymp. Sig. (2-tailed)		.488

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Berdasarkan tabel diperoleh nilai Kolmogorov-Smirnov (K-S) sebesar 0,835 dan signifikan pada 0,488 dan nilainya diatas  $\alpha=0,05$ . Hal ini berarti Ho diterima yang berarti data residual terdistribusi normal.

## D. UJI HIPOTESIS

### D.1. Hipotesis Pertama

Pengujian permasalahan pertama yang dituangkan dalam hipotesis pertama adalah bagaimana pemahaman pemuka agama (kognisi, afeksi dan konasi) terhadap pelaksanaan Peraturan Bersama Menteri (PBM) dalam Pembinaan Kerukunan Antar Umat Beragama, dengan analisis korelasi sebagai berikut:

**Tabel 43**  
**Analisis Korelasi Pemahaman pemuka agama (kognisi, afeksi dan konasi) terhadap implementasi Peraturan Bersama Menteri (PBM) dalam Pembinaan Kerukunan Umat beragama**

		Correlations			
		Kognisi.X1	Afeksi.X1	Konasi.X1	Implementasi.Y
Kognisi.X1	Pearson Correlation	1	.319**	.377**	.276**
	Sig. (2-tailed)		.001	.000	.003
	N	113	113	113	113
Afeksi.X1	Pearson Correlation	.319**	1	.534**	.225*
	Sig. (2-tailed)	.001		.000	.016
	N	113	113	113	113
Konasi.X1	Pearson Correlation	.377**	.534**	1	.411**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000
	N	113	113	113	113
Implementasi Y	Pearson Correlation	.276**	.225*	.411**	1
	Sig. (2-tailed)	.003	.016	.000	
	N	113	113	113	113

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

\* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Berdasarkan tabel diatas, secara kognisi menunjukkan angka korelasi sebesar 0,276 yang signifikan sebesar 0,003, begitu juga secara afeksi yang ditunjukkan dengan angka korelasi sebesar 0,225 dengan signifikansi 0,016 dan secara konasi yang ditunjukkan dengan angka korelasi 0,411 signifikansi 0,000 berada dibawah angka signifikansi 0,05 dan berkorelasi positif. Artinya pemahaman pemuka agama secara kognisi berkorelasi positif signifikan (0,003) terhadap implementasi PBM dalam pembinaan kerukunan umat beragama. Pemahaman pemuka agama secara afeksi berkorelasi positif signifikan (0,016) terhadap implementasi PBM dalam pembinaan kerukunan umat beragama. Pemahaman pemuka agama secara konasi berkorelasi positif signifikan (0,000) terhadap implementasi PBM dalam pembinaan kerukunan umat beragama. Dengan demikian disimpulkan bahwa pemahaman pemuka agama (kognisi, afeksi dan konasi) berkorelasi signifikan

terhadap pelaksanaan Peraturan Bersama Menteri (PBM) dalam pembinaan kerukunan umat beragama.

## D.2. Hipotesis Kedua

Pengujian permasalahan kedua yang dituangkan dalam hipotesis kedua adalah apakah ada pengaruh Sumber Daya Manusia pemuka agama, regulasi dan sikap birokrat atau aparatur pemerintah terhadap pelaksanaan Peraturan Bersama Menteri dalam Pembinaan Kerukunan Antar Umat Beragama yang dilakukan dengan analisis regresi. Ketepatan fungsi regresi dalam menaksir nilai aktual dapat diukur dari *Goodness of fitnya*. Secara statistik dapat diukur dari nilai koefisien determinasi, nilai statistik F dan nilai statistik t. Perhitungan statistik disebut signifikan secara statistik apabila nilai uji statistiknya berada dalam daerah kritis ( $P\text{-value} < \alpha$ , maka  $H_a$  diterima) dengan koefisien keyakinan 95%.

### D.2.1. Koefisien Determinasi

**Tabel 44**  
**Hasil uji koefisien determinasi**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.578 <sup>a</sup>	.334	.316	6.147

a. Predictors: (Constant), SKP.X2, SDM.X2, R.X2

b. Dependent Variable: IMP.Y

Untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen dapat dilihat dari hasil uji determinasi. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai  $R^2$  yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

Berdasarkan tabel diperoleh nilai  $R^2$  sebesar 0,334 atau nilai Adjusted  $R^2$  sebesar 0,316. Artinya semua variabel independen yaitu sumber daya manusia, regulasi dan sikap aparatur pemerintah mampu menjelaskan 33,4% variabel implementasi PBM dalam pembinaan kerukunan umat (dependen), sementara itu sisanya sebesar 66,6% dijelaskan oleh sebab-sebab yang lain. Nilai  $R^2$  yang diperoleh dalam hasil penelitian ini tidak mendekati satu atau kecil, artinya

kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas.

### D.2.2. Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

Uji statistik F menunjukkan apakah semua variabel independen mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Hipotesis nol yang hendak diuji adalah apakah semua parameter dalam model sama dengan nol atau  $H_0: b_1 = b_2 = \dots = b_k = 0$ . Artinya: semua variabel independen bukan merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen. Hipotesis alternatifnya ( $H_A$ ) adalah tidak semua parameter secara simultan sama dengan nol atau  $H_a: b_1 \neq b_2 \neq \dots \neq b_k \neq 0$ . Artinya: semua variabel independen merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen.

Untuk menguji hipotesis ini digunakan kriteria pengambilan keputusan yaitu bila nilai F lebih besar dari 4 maka  $H_0$  dapat ditolak pada derajat kepercayaan 5%. Dengan kata lain menerima hipotesis alternatif yang menyatakan bahwa semua variabel independen secara serentak mempengaruhi variabel dependen.

**Tabel 45**  
**Hasil Uji Regresi SDM, Regulasi dan Sikap terhadap**  
**implementasi PBM secara simultan(F-test)**  
**ANOVA<sup>b</sup>**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	2069.867	3	689.956	18.257	.000 <sup>a</sup>
	Residual	4119.142	109	37.790		
	Total	6189.009	112			

a. Predictors: (Constant), SKP.X2, SDM.X2, R.X2

b. Dependent Variable: IMP.Y

Dari hasil penelitian diperoleh F hitung sebesar 18,257 dengan probabilitas 0,000. Nilai probabilitas ini jauh lebih kecil dari 0,05 maka model regresi dapat digunakan untuk memprediksi implementasi PBM dalam pembinaan kerukunan umat beragama. Kata lain, Sumber Daya Manusia pemuka agama, regulasi dan sikap aparatur pemerintah secara bersama-sama berpengaruh terhadap implementasi PBM dalam pembinaan kerukunan umat beragama.



### D.2.3. . Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)

Uji statistik t menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Hipotesis yang hendak diuji adalah apakah parameter ( $b_i$ ) sama dengan nol ( $H_0: b_i=0$ ) atau tidak sama dengan nol ( $H_a: b_i \neq 0$ ).  $H_0$  artinya suatu variabel independen bukan merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen.  $H_a$  artinya suatu variabel independen merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen.

**Tabel 46**  
**Hasil Uji Regresi SDM, Regulasi dan Sikap terhadap implementasi PBM secara parsial (t-test)**  
Coefficient <sup>a</sup>

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	7.840	3.754		2.088	.039
SDM.(X1)	-.317	.289	-.086	-1.099	.274
Regulasi (X2)	.498	.239	.217	2.088	.039
Sikap (X3)	.977	.247	.410	3.958	.000

a. Dependent Variable: Impl.(Y)

Untuk melakukan uji t adalah bila jumlah *degree of freedom (df)* adalah 20 atau lebih dan derajat kepercayaan sebesar 5%, maka  $H_0$  yang menyatakan  $b_i=0$  dapat ditolak bila nilai t lebih besar dari 2 (dalam nilai absolut). Dengan kata lain menerima hipotesis alternatif yang menyatakan bahwa suatu variabel independen secara individual mempengaruhi variabel dependen.

Dari ketiga variabel independen yaitu SDM pemuka agama (X1), Regulasi (X2) dan Sikap Aparatur pemerintah (X3) yang dimasukkan dalam model regresi, hanya variabel SDM pemuka agama yang tidak signifikan (0,274) jauh diatas 0,05. Sedangkan Regulasi (sig= 0,039) dan Sikap aparatur pemerintah (sig=0,000) signifikan pada 0,05. Dapat disimpulkan bahwa implementasi PBM dipengaruhi oleh regulasi dan sikap aparatur pemerintah.

Untuk menginterpretasikan koefisien variabel independen dapat menggunakan *unstandardized coefficients* atau *standardized coefficients*. Berdasarkan *unstandardized coefficients*, variabel implementasi PBM dipengaruhi

oleh SDM pemuka agama, regulasi dan sikap aparatur pemerintah dengan persamaan matematis sebagai berikut (tabel 46):

Implementasi PBM = 7,840 – 0,317 SDM + 0,498 Regulasi + 0,977 Sikap aparatur  
Penjelasan:

- Konstanta sebesar 7,840 menyatakan bahwa jika variabel independen dianggap konstan, maka rata-rata implementasi PBM sebesar 7,840
- Koefisien regresi SDM pemuka agama sebesar -0,317 menyatakan bahwa setiap penambahan 1000 SDM pemuka agama akan menurunkan implementasi PBM sebesar 317.
- Koefisien regresi regulasi sebesar 0,498 menyatakan bahwa setiap penambahan 1000 regulasi akan meningkatkan implementasi PBM sebesar 498.
- Koefisien regresi sikap aparatur pemerintah sebesar 0,977 menyatakan bahwa setiap penambahan 1000 sikap aparatur pemerintah akan meningkatkan implementasi PBM sebesar 977.

## **E. PEMBAHASAN**

### **E.1. Pembahasan Hipotesis Pertama: Hubungan Pemahaman Pemuka Agama (Kognisi, Afeksi, Konasi) Terhadap Implementasi Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri Dalam Pembinaan Kerukunan Umat Beragama Di Pekanbaru Provinsi Riau**

Berdasarkan analisis korelasi diatas dapat diketahui bahwa ada hubungan positif signifikan pemahaman pemuka agama baik dalam konteks kognisi, afeksi dan konasi terhadap implementasi Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri Dalam Pembinaan Kerukunan Umat Beragama Di Pekanbaru Provinsi Riau. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas pemahaman pemuka agama terhadap SPBM berpengaruh terhadap pembinaan kerukunan umat beragama.

Makna dari pemahaman pemuka agama tersebut terhadap pembinaan kerukunan hidup antar umat beragama harus dipertegas atau diperjelas. Kata lain, pemuka agama harus diberikan informasi yang benar mengenai makna sosial dari kerukunan umat beragama baik secara internal maupun antar umat beragama (eksternal).

Ditambahkan bahwa pemuka agama secara personal tidak dapat dipisahkan dari implementasi ajaran keagamaannya. Artinya pemahaman pemuka agama terhadap nilai-nilai agama yang dianutnya berhubungan dengan perilaku umat yang dipimpinnya. Mengingat begitu besar hubungannya antara pemahaman pemuka agama terhadap kerukunan umat beragama sebagai pengejawantahan dari SPBM dalam konteks kesosialannya maka sudah menjadi keharusan untuk memberdayakan pemuka agama dalam mewujudkan kerukunan umat beragama.

Disamping itu dalam pembinaan serta mewujudkan kerukunan inter dan antar umat beragama harus dicermati terjadinya percampuran antara pemahaman pemuka agama yang bertendensius personality dengan pemahaman pemuka agama yang berlandaskan kepada nilai tekstual dan kontekstual ajaran agamanya. Hal ini dimaksudkan agar dalam pembinaan dan mewujudkan kerukunan inter dan antar umat beragama tidak bertumpu kepada pemuka agama secara emosional. Kata lain dalam pembinaan dan mewujudkan kerukunan inter dan antar umat beragama tidak terjebak kedalam tataran pemahaman yang sempit. Sebab kekerdilan dalam memahami prinsip dasar dari ajaran keagamaan dan menyeret emosional umat kedalam pemahaman yang tendensius dari pemuka agama akan mempersulit mewujudkan kerukunan umat beragama secara fundamental.

Sebagaimana diketahui bahwa hubungan pemahaman pemuka agama terhadap implementasi Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri Dalam Pembinaan Kerukunan Umat Beragama (SPBM) cukup signifikan, akan tetapi kontribusi sosial budaya masyarakat perlu juga diperhatikan dalam mengimplementasikan SPBM tersebut. Hal ini bertujuan agar tidak terbentuk kondisi sosial yang tidak berimbang antara pemahaman keagamaan dengan praktek budaya yang berkembang dalam masyarakat.

Menurut pengamatan peneliti terhadap kondisi dinamika sosial di Propinsi Riau secara umum dan di Pekanbaru secara khusus, bahwa terwujudnya keharmonisan hubungan inter dan antar umat beragama tidak terlepas dari kontribusi budaya yang berkembang dalam masyarakat, dimana dinamika budaya masyarakat memberikan peluang terwujudnya toleransi hidup beragama selama toleransi tersebut tidak bersifat melampaui batasan-batasan agama dan budaya

masyarakat. Sebagaimana dikatakan dalam tomo adat melayu, *dimana bumi dipijak, disitu langit dijunjung, dimana air disauk, disitu ranting dipatahkan*. Tomo unjuk ajar ini menggambarkan perlunya kearifan dan hidup bermanfaat bagi kehidupan bermasyarakat. Kata lain, walaupun masyarakat hidup dalam heterogenitas budaya dan agama di Pekanbaru khususnya harus saling menghargai dan memberikan kontribusi positif terhadap kemajuan dan peradaban serta berorientasi masa depan yang lebih dinamis dan harmonis.

## **E.2. Pembahasan Hipotesis Kedua: Pengaruh Faktor Sumber Daya Manusia Pemuka Agama, Regulasi Dan Sikap Birokrat/Aparatur Pemerintah Terhadap Implementasi Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri Dalam Pembinaan Kerukunan Umat Beragama Di Pekanbaru Provinsi Riau**

Merujuk pada hasil analisis regresi diatas, dimana faktor Sumber Daya Manusia Pemuka Agama yang diukur berdasarkan tingkat pendidikan, lamanya keterlibatan membina umat, dan faktor motivasi membina umat beragama tidak memberikan kontribusi yang signifikan terhadap implementasi Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri Dalam Pembinaan Kerukunan Umat Beragama. Hal ini menunjukkan bahwa kerukunan inter dan antar umat beragama tidak dipengaruhi oleh faktor SDM pemuka agama. Kata lain, terjadinya berbagai kekisruhan sosial yang bermula dari pemahaman keagamaan pemuka agama tidak dapat dibenarkan. Artinya kontribusi SDM pemuka agama tidak dapat dijadikan justifikasi memicu terjadinya konflik sosial yang berlebelkan agama.

Sementara itu berdasarkan hasil analisis regresi atas bahwa faktor regulasi dan faktor sikap birokrat atau aparatur pemerintah berpengaruh cukup signifikan, mempengaruhi implementasi Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri Dalam Pembinaan Kerukunan Umat Beragama. Artinya berbagai hubungan dan konflik antar dan inter umat beragama cukup signifikan dipengaruhi oleh faktor regulasi dan sikap aparat pemerintah itu sendiri. Oleh sebab itu pembinaan kerukunan inter dan antar umat beragama melalui rekayasa kondisi sosial, tidak terlepas dari upaya pembinaan baik dalam bentuk regulasi dan sikap dari aparatur pemerintah sendiri.

Hasil penelitian ini juga memberikan gambaran bahwa dominasi regulasi serta sikap aparat pemerintah terhadap pembinaan kerukunan umat beragama cukup signifikan. Artinya apapun wujud regulasi serta sikap yang dilakoni oleh aparat pemerintah berkontribusi terhadap pengimplementasikan SPBM.

Hasil penelitian ini juga menjelaskan bahwa dinamika sosial secara umum dan dinamika kehidupan beragama dalam masyarakat secara khusus tidak dapat dilepaskan dari pengaruh regulasi dan sikap dari aparat pemerintah itu sendiri.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Menelaah berbagai pemicu konflik agama, bukan selamanya didalangi oleh persepsi umat, tetapi terkadang lebih disebabkan sikap dan perilaku pemuka agama yang tidak terbuka terhadap agama lain. Pengertian pemahaman keagamaan yang salah dari pemuka agama, atau bisa saja disebabkan oleh faktor pemahaman pemuka agama terhadap PBM nomor 9/8 Tahun 2006, tentang kerukunan umat beragama, atau penyebab regulasi atau kepribadian birokrat yang mendorong lahirnya sikap dan perilaku yang berpotensi memicu konflik sosial antar dan inter umat beragama.

Berdasarkan analisis data diperoleh hasil penelitian yang cukup berarti. Semua data memenuhi syarat uji reliabilitas dan uji validitas serta uji normalitas. Hipotesis pertama menyatakan bahwa pemahaman pemuka agama secara kognisi berkorelasi positif (0,276) signifikan (0,003), secara afeksi berkorelasi positif (0,225) signifikan (0,016), secara konasi berkorelasi positif (0,411) signifikan (0,000) terhadap implementasi SPBM dalam pembinaan kerukunan umat beragama. Dengan demikian disimpulkan bahwa pemahaman pemuka agama (kognisi, afeksi dan konasi) berkorelasi signifikan terhadap pelaksanaan Peraturan Bersama Menteri (PBM) dalam pembinaan kerukunan umat beragama.

Pengujian permasalahan kedua yang dituangkan dalam hipotesis kedua adalah apakah ada pengaruh Sumber Daya Manusia pemuka agama, regulasi dan sikap birokrat atau aparatur pemerintah terhadap pelaksanaan Peraturan Bersama Menteri dalam Pembinaan Kerukunan Antar Umat Beragama yang dilakukan dengan analisis regresi. Nilai koefisien determinasi  $R^2$  sebesar 0,334. Artinya semua variabel independen yaitu sumber daya manusia, regulasi dan sikap aparatur pemerintah mampu menjelaskan 33,4% variabel implementasi PBM dalam pembinaan kerukunan umat (dependen), sementara itu sisanya sebesar 66,6% dijelaskan oleh sebab-sebab yang lain. Diperoleh nilai F hitung sebesar 18,257 dengan probabilitas 0,000, jauh lebih kecil dari 0,05 maka model regresi dapat

digunakan untuk memprediksi implementasi PBM dalam pembinaan kerukunan umat beragama. Kata lain, Sumber Daya Manusia pemuka agama, regulasi dan sikap aparatur pemerintah secara bersama-sama berpengaruh terhadap implementasi PBM dalam pembinaan kerukunan umat beragama.

Dari ketiga variabel independen yaitu SDM pemuka agama (X1), Regulasi (X2) dan Sikap Aparatur pemerintah (X3) yang dimasukkan dalam model regresi, hanya variabel SDM pemuka agama yang tidak signifikan (0,274) jauh diatas 0,05. Sedangkan Regulasi (sig= 0,039) dan Sikap aparatur pemerintah (sig=0,000) signifikan pada 0,05. Dapat disimpulkan bahwa implementasi PBM dipengaruhi oleh regulasi dan sikap aparatur pemerintah.

## **B. SARAN**

Mengingat kerukunan umat beragama merupakan salah satu modal sosial dalam membangun interaksi sosial serta karakter bangsa, persoalan yang berkaitan dengan upaya pembinaan kerukunan umat beragama merupakan hal yang sangat urgen untuk diperhatikan baik dalam bentuk interaksi sosial umat beragama maupun regulasi yang berkaitan dengan pembinaan kerukunan umat beragama tersebut. Mengacu pada hasil penelitian dapatlah diberikan saran sebagai berikut:

1. Implementasi PBM dalam pembinaan kerukunan umat beragama dipengaruhi oleh regulasi dan sikap aparatur pemerintah hanya diketahui sebatas kalangan pemuka agama, sehingga perlu disosialisasikan lagi kepada masyarakat supaya masyarakat inter dan antar umat beragama dapat mengetahui secara menyeluruh.
2. Sumber daya pemuka agama ternyata tidak berpengaruh terhadap pengimplementasian PBM dalam pembinaan kerukunan umat beragama, dan oleh karena itu perlu diupayakan lagi media yang dapat menyentuh langsung pada masyarakat inter dan antar umat beragama sehingga tercipta kerukunan umat beragama.
3. Pemuka agama perlu mencari alternatif lain dalam penyampaian implementasi PBM dalam pembinaan kerukunan umat beragama.

4. Perlunya kerja sama pemerintah dan pemuka agama ditingkatkan agar implementasi PBM dalam pembinaan kerukunan umat beragama lebih berdaya guna bagi kepentingan umat beragama.

### **C. KETERBATASAN**

Ada beberapa hal yang dialami dalam melakukan penelitian ini, sehingga membatasi hasil penelitian, diantaranya:

1. Jumlah sampel dalam penelitian ini dicermati masih terbatas yaitu kalangan pemuka agama yang langsung berperan dalam agamanya masing-masing. Penelitian selanjutnya diperbanyak lagi jumlah sampelnya dan lokasi penelitiannya supaya dapat dikembangkan lagi, tidak hanya di wilayah Pekanbaru saja.
2. Penelitian ini hanya melihat dari sisi pemuka agama, sementara yang merasakan efek implementasi PBM dalam pembinaan kerukunan umat beragama adalah masyarakat umat beragama. Diharapkan penelitian selanjutnya juga melibatkan umat beragama sehingga diperoleh hasil yang lebih optimal.
3. Dalam penelitian ini variabel SDM pemuka agama, regulasi dan sikap birokrat/ aparat pemerintah ternyata mampu memberikan kontribusi 33,4% dalam menjelaskan pelaksanaan PBM dalam pembinaan kerukunan umat beragama, sedangkan sisanya 66,6% dijelaskan oleh variabel lain, misalnya budaya. Penelitian selanjutnya disarankan juga untuk meneliti variabel budaya dan lainnya yang berpengaruh terhadap pelaksanaan PBM tersebut.



## DAFTAR BACAAN

- Ali, Mursyid. 2003. *Peta Kerukunan Umat Beragama di Indonesia*. Departemen Agama Republik Indonesia. Jakarta.
- Hamidy, UU. 1993. *Kerukunan Hidup Beragama di daerah Riau*. Universitas Islam Riau.
- Departemen Agama Republik Indonesia Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan. 2008. *Merajut Kerukunan Umat Beragama Melalui Dialog, Pengembangan Wawasan Multikultural*. Jakarta.
- Wordpress. <http://tatangmanguny.wordpress.com>), Down Load tanggal 12 Maret 2012
- Wordpress. <http://denaizzkakakecil.wordpress.com/2009/11/10/> konflik-agama/  
*Down Load*, 12 Maret 2012.
- social-sciences. <http://id.shvoong.com/social-sciences/education/2200774-pengertian-pemahaman/>, Down Load, 12 Maret 2012, pukul 14.25 WIB.
- Suara Pembaruan. <http://www.suarapembaruan.com/home/kasus-gki-yasmin-bukan-konflik-antarumat-beragama/> 10135, *down load, 12 maret 2011* .
- Kumpulan Makalah Seminar. 1990. *Ilmu Perbandingan Agama di Indonesia (beberap permasalahan)*. INIS, Jakarta.
- Sumanto 1995. *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan* <http://blog.re.or.id/cara-menentukan-besarnya-sampel-sample-size.htm>, diakses tanggal 2 April 2012
- Team Penyusunan Naskah Monografi Kerukunan Hidup Beragama. 1981/1982. *Monografi Kelembagaan Agama di Indonesia*. Proyek Pembinaan Kerukunan Hidup Beragama Departemen Agama R.I. Jakarta.

